



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Muhamad Faozi Kurniawan

Kebijakan & Manajemen Kesehatan (HPM)

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan

Universitas Gadjah Mada

2024



Isi



1. Pendahuluan
2. Sumber Dana
3. Mekanisme pembiayaan
4. Kasus di Indonesia
5. Penutup



1

Pendahuluan

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman bencana



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bencana Alam



Bencana Non Alam



BENCANA INDONESIA 2024



B N P B

DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2024

RUMAH RUSAK - TOTAL: 80.304

RUMAH RUSAK BERAT 13.104

RUMAH RUSAK SEDANG 15.295

RUMAH RUSAK RINGAN 51.905

FASILITAS RUSAK - TOTAL: 1.109

SATUAN PENDIDIKAN 612

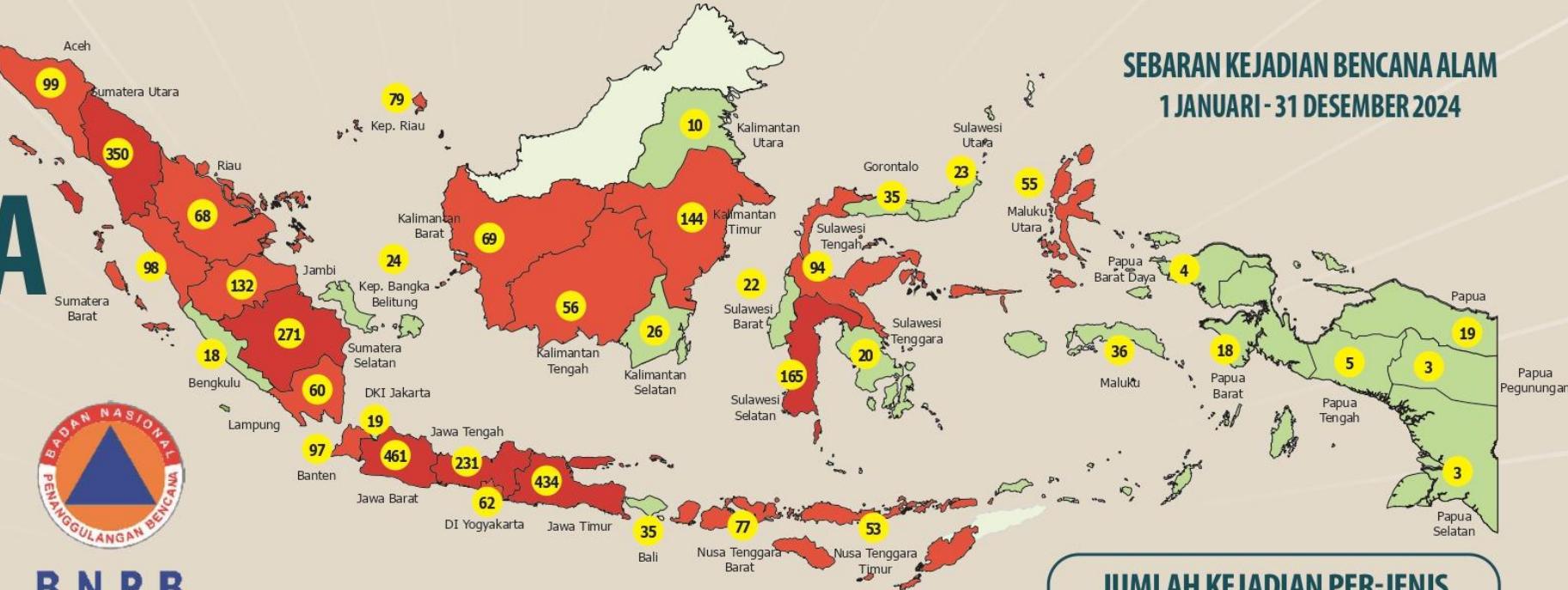
RUMAH IBADAT 415

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 82

KANTOR & JEMBATAN RUSAK - TOTAL: 534

KANTOR RUSAK 89

JEMBATAN RUSAK 445



DAMPAK BENCANA ALAM 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024

MENINGGAL DUNIA 540

HILANG 63

LUKA - LUKA / SAKIT 11.531

MENDERITA & MENGUNGSI 8.136.271

TOTAL BENCANA TAHUN 2024

Update 31 Desember 2024

3.472

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM
1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024

Jumlah Kejadian

< 50
50 - 150
> 150

JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2024

BENCANA ALAM

GEMPA BUMI 15

ERUPSI GUNUNGAPI 8

BANJIR 1.420

KARHUTLA 973

CUACA EKSTREM 733

TANAH LONGSOR 207

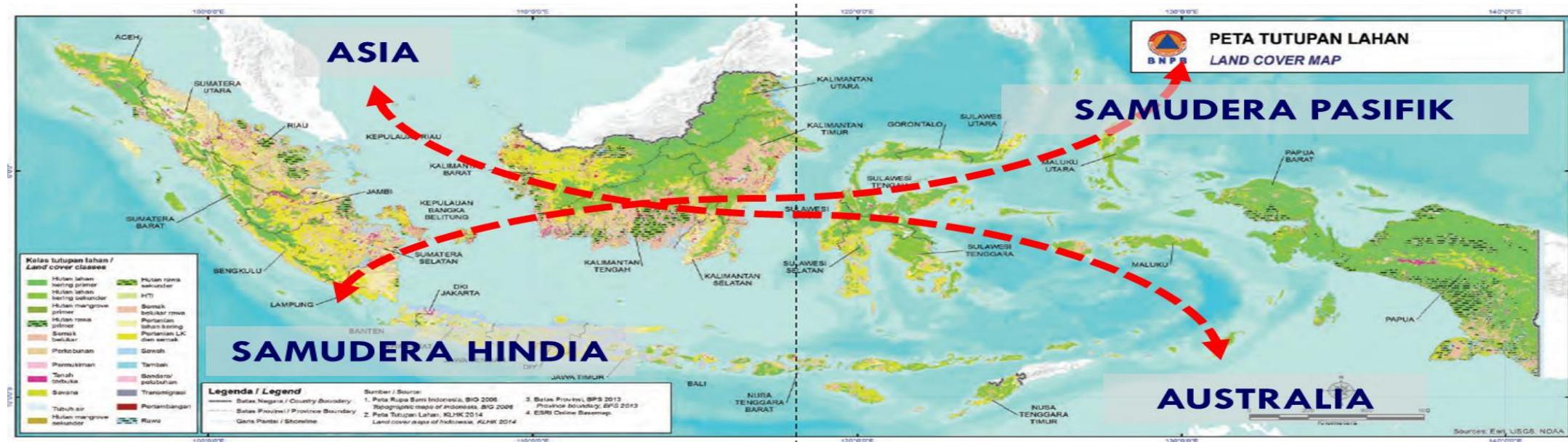
KEKERINGAN 89

GELOMBANG PASANG & ABRASI 27

Indonesia rentan terhadap Bencana Non alam/ Bencana kesehatan



UNIVERSITAS GADJAH MADA



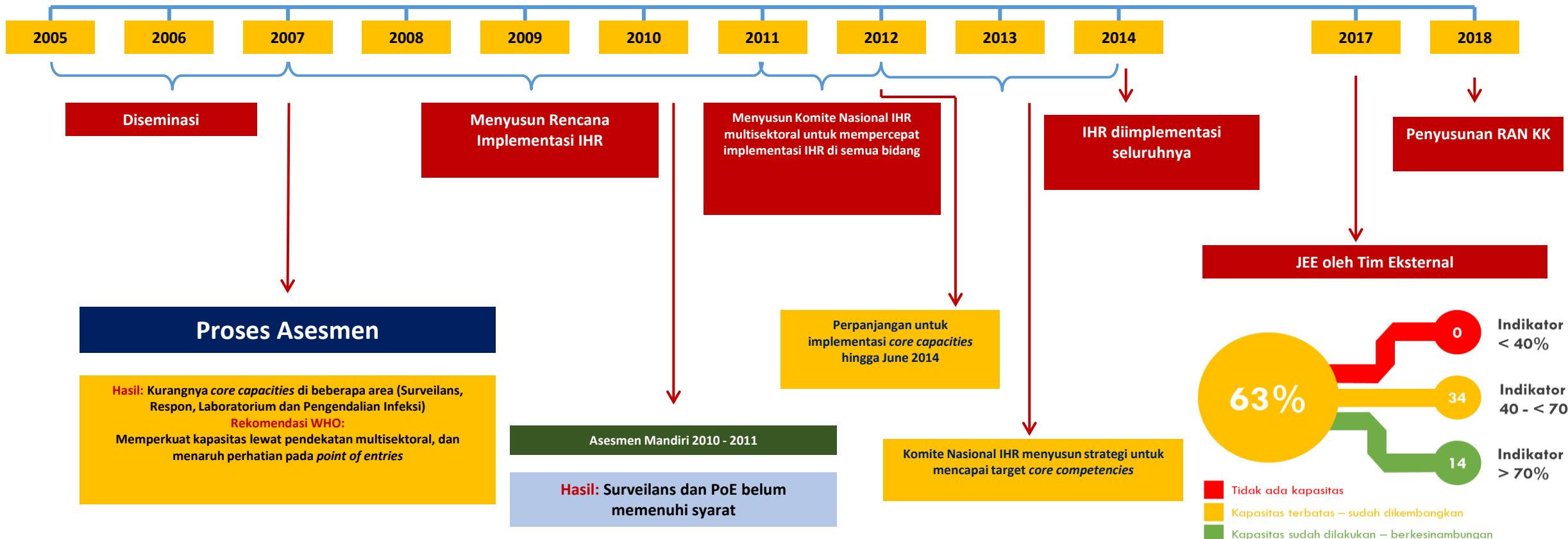
- Wilayah yang berisiko tinggi terhadap penyakit menular termasuk zoonosis, seperti SARS (2003), Avian Flu (2003), Zika (2016), dsb
- Biodiversitas dan interaksi yang tinggi antara manusia, hewan, dan lingkungan



KETAHANAN KESEHATAN



Ketahanan Kesehatan Indonesia



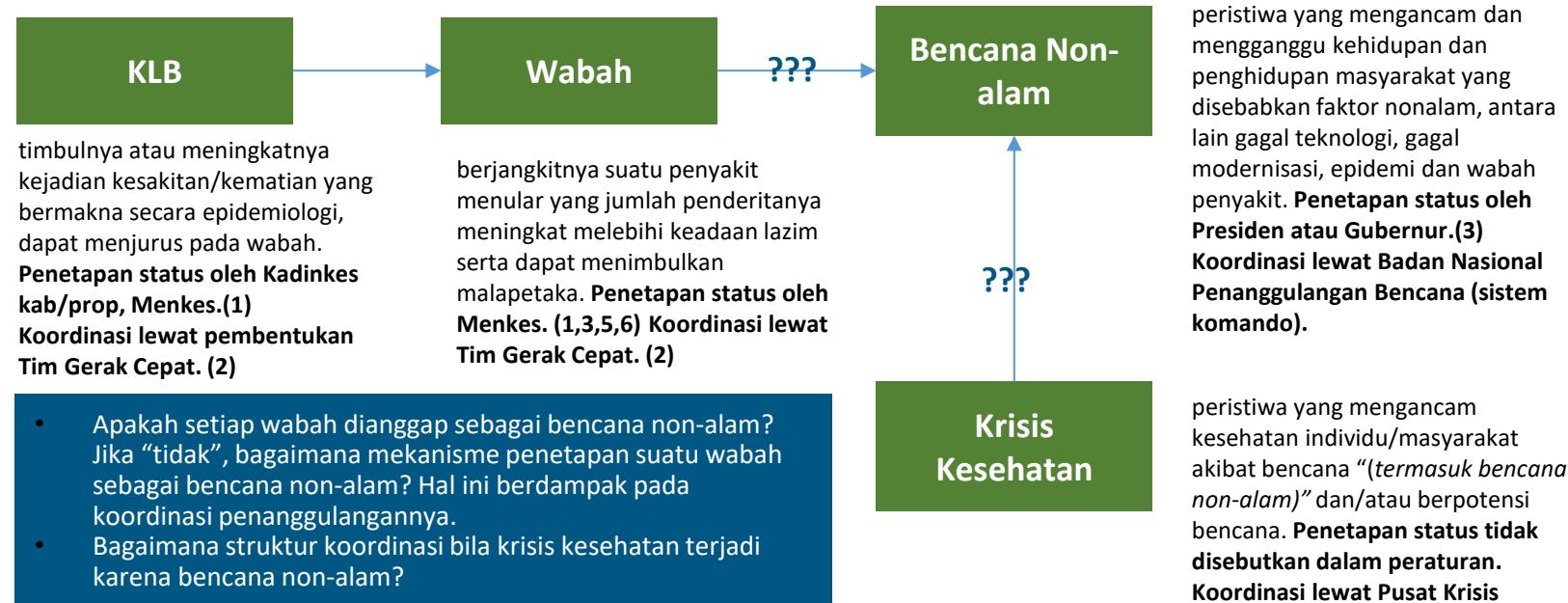
Sumber: Kemenkes RI, 2018. Indonesia experience in developing national action plan for health security. 5th GHSA Ministerial Meeting.

Bagaimana koordinasi ketahanan kesehatan dari perspektif bencana?



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Peraturan dan perundangan terkait bencana, wabah dan krisis kesehatan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga berbeda dengan penggunaan istilah dan skema koordinasi yang berbeda pula.



Sumber :

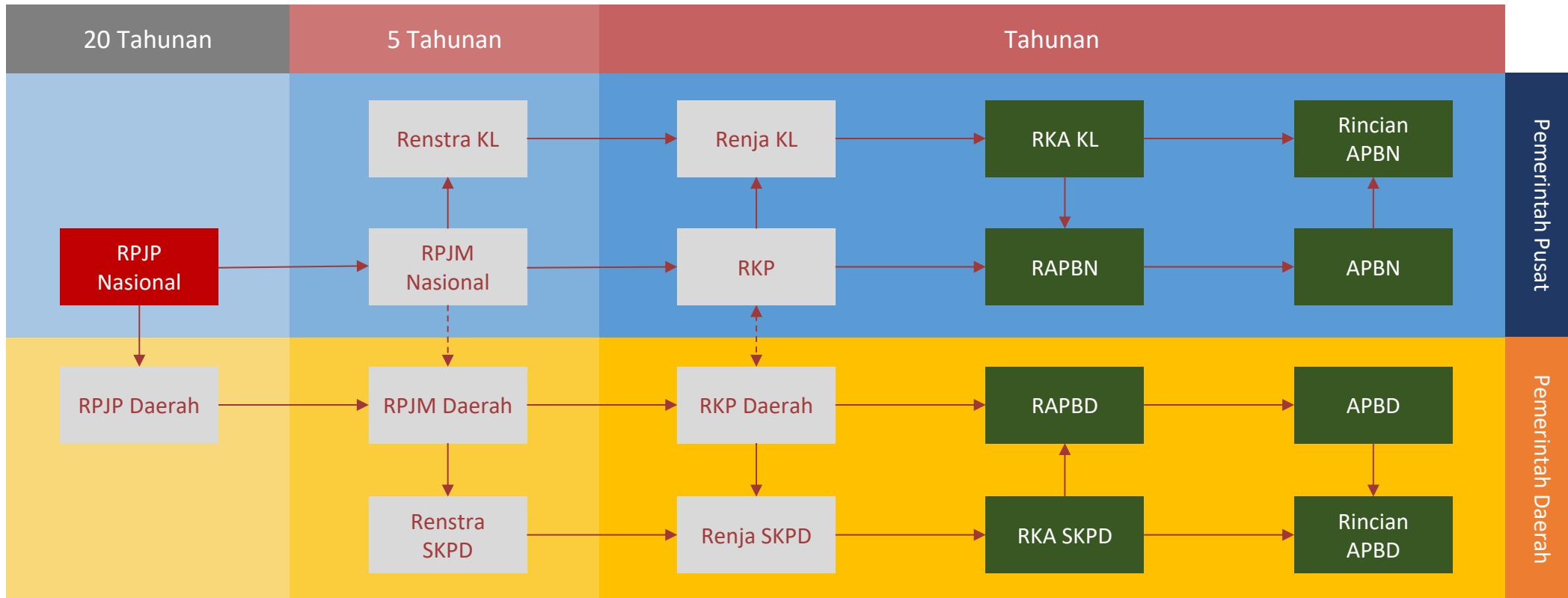
1. Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Menular Berpotensi Wabah
2. Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
5. Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah
6. Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular

→ status dapat berubah

**Siapa
yang
menjadi
Leader?**



Proses perencanaan program di tingkat pusat dan daerah melalui berbagai tahapan yang kompleks, merujuk pada RPJMN/D dan RPJPN/D --> mendukung Ketahanan Kesehatan tingkat Pusat dan Daerah



Sumber :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



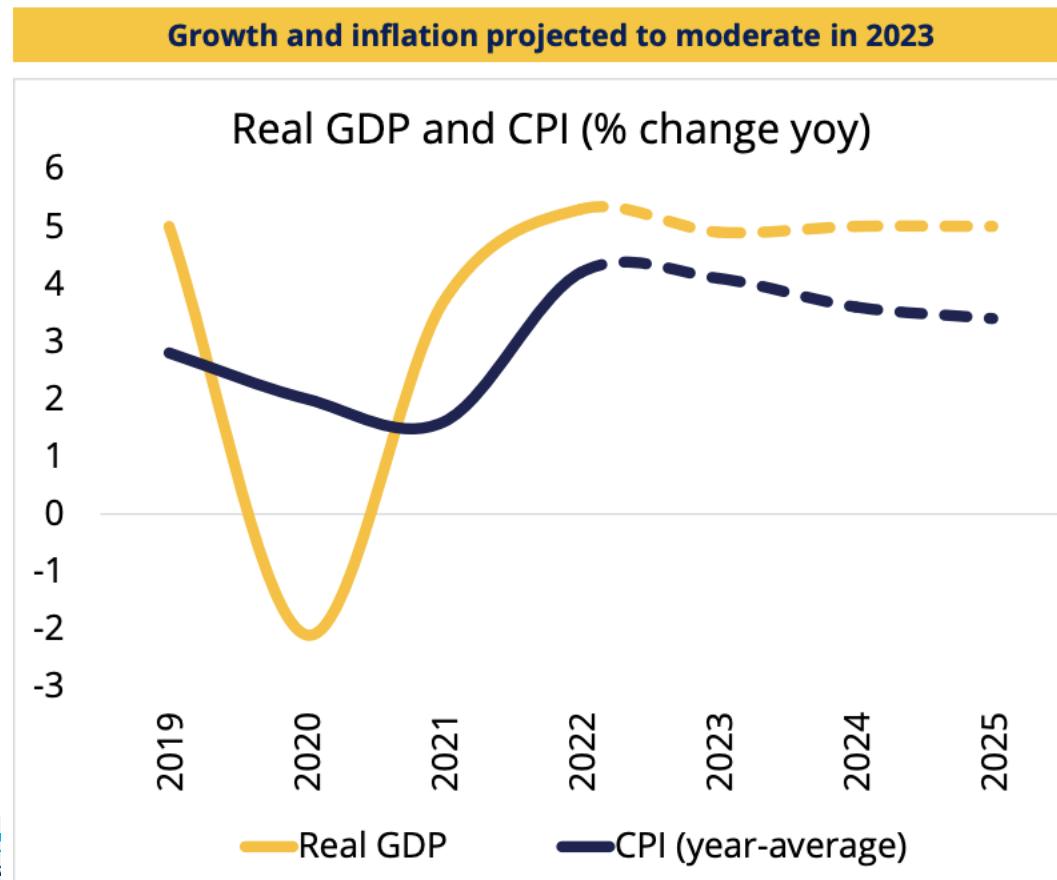
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Konteks Fiskal Makro Indonesia

Sumber-sumber penyeimbangan kembali pertumbuhan ekonomi seiring dengan normalisasi ekonomi dari pengaruh kondisi global



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Source: BPS, WB staff calculations.

Amid stable macroeconomic conditions

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Actual				Projection		
Real GDP	5.0	-2.1	3.7	5.3	4.9	5.0	5.0
CPI (end of period)	2.6	1.7	1.9	5.5	3.6	3.4	3.3
Fiscal Balance	-2.2	-612	-4.6	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5
Central Government Debt	30.2	39.3	40.7	39.5	39.2	38.8	38.6
Current account balance	-2.7	-0.4	0.3	1.0	0.0	-0.4	-1.0
Net Foreign Direct Investment	1.8	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4

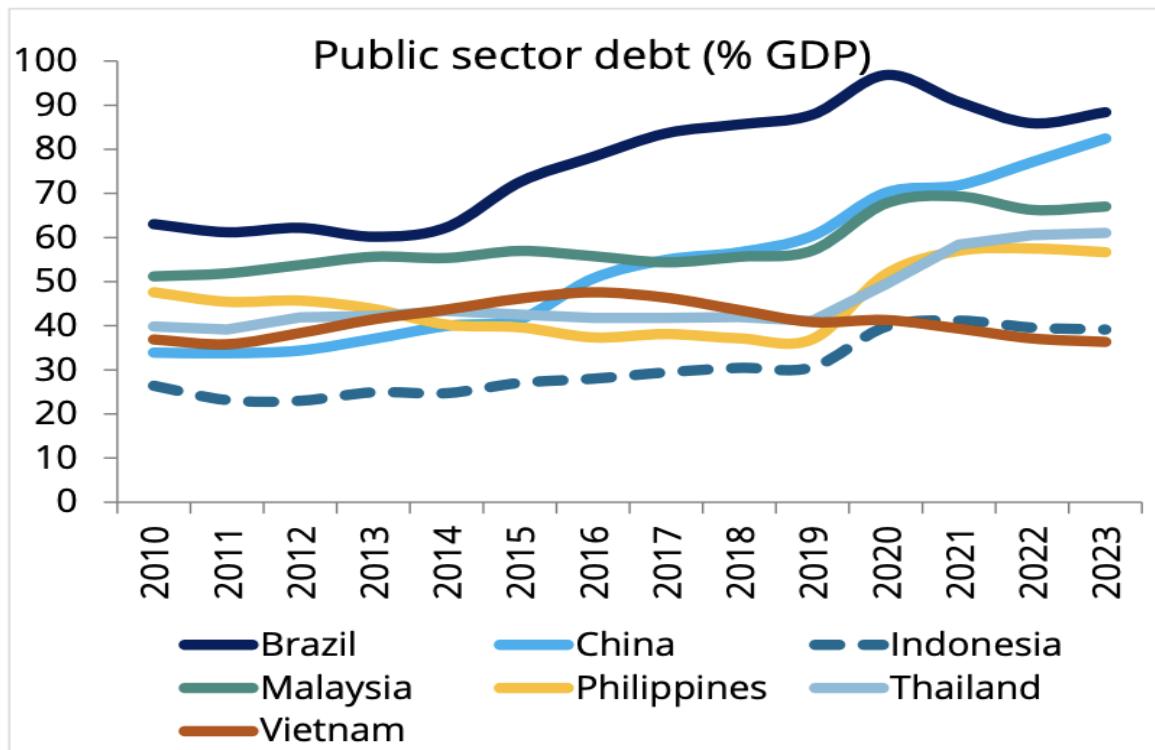
Source: BPS, Bank Indonesia, WB staff calculations.

Indonesia mengalami kemajuan yang bermakna...



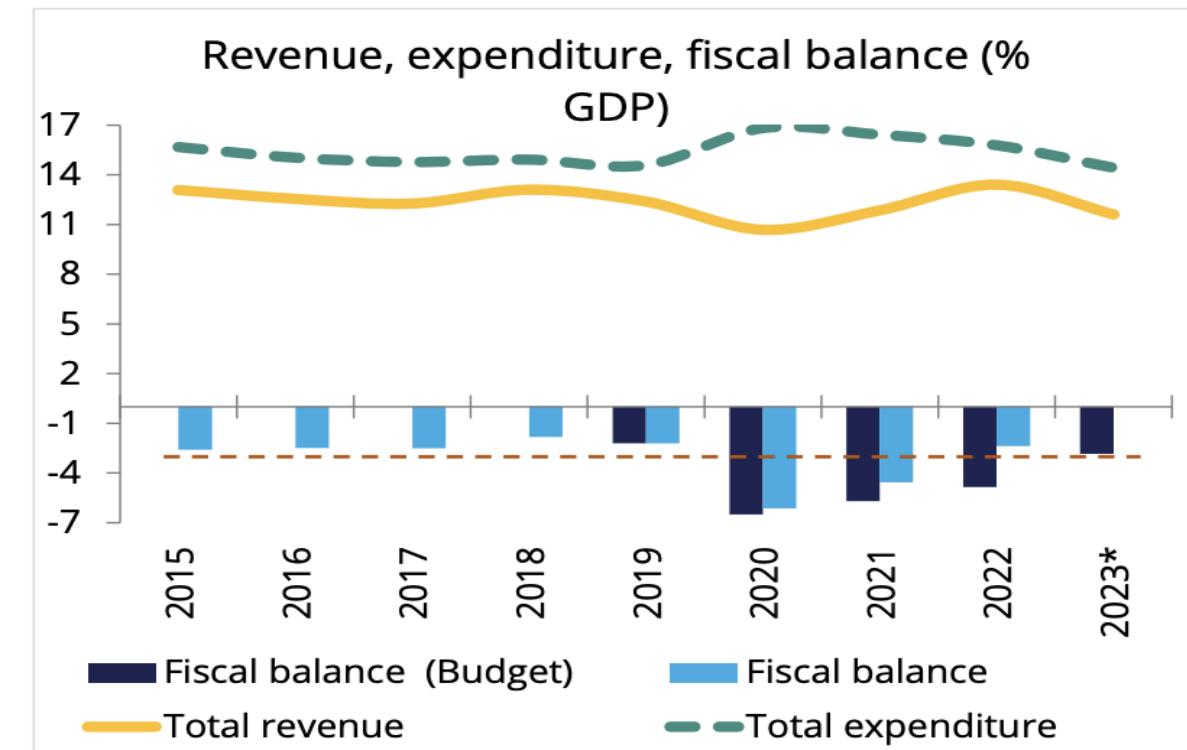
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Government debt increased by less than peer countries during COVID



Source: IMF Fiscal Monitor April 2023.

And has started to decline with prudent fiscal policies and growth



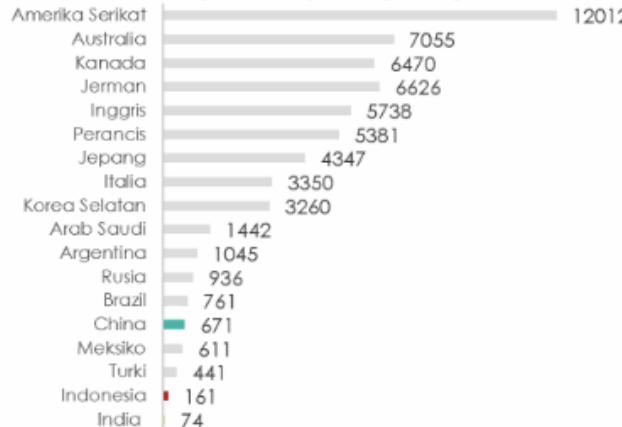
Source: Ministry of Finance, WB staff calculations.



Belanja Kesehatan Indonesia diantara Negara Anggota G20

Skema publik masih mendominasi proporsi belanja kesehatan di berbagai negara

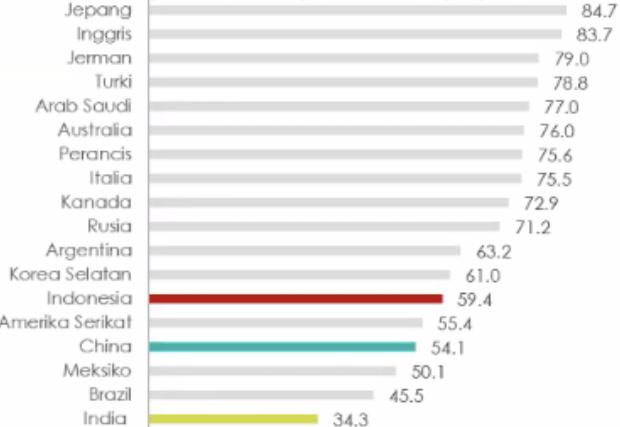
CHE per Kapita (USD)



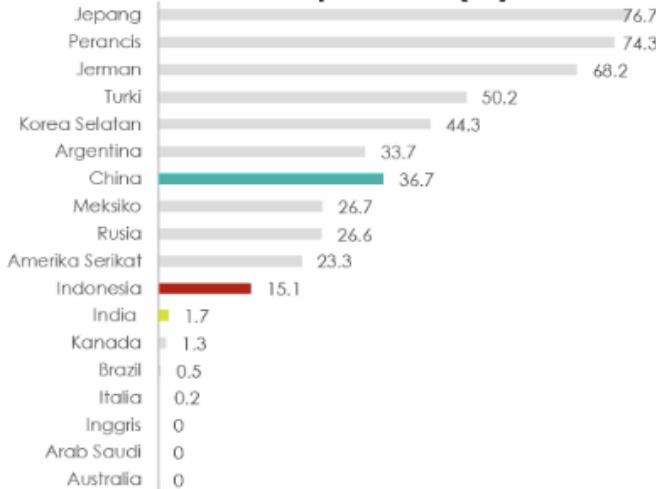
CHE per PDB (%)



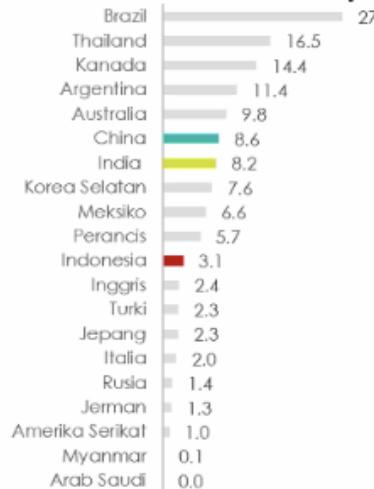
Belanja Publik per CHE (%)



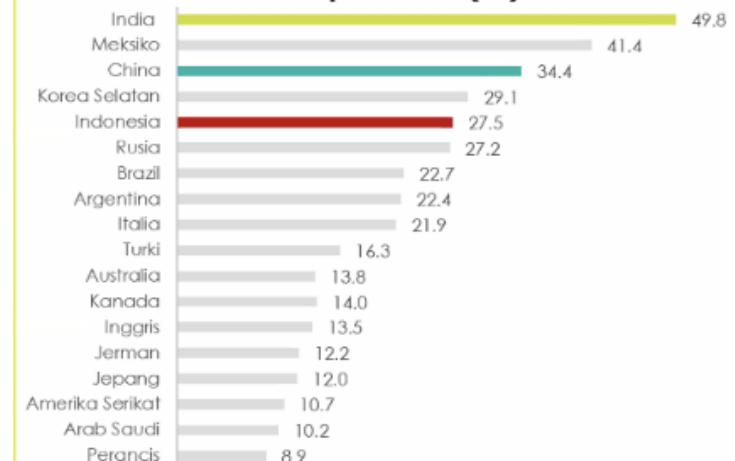
Askes Sosial per CHE (%)



Asuransi Swasta per CHE (%)



OOP per CHE (%)

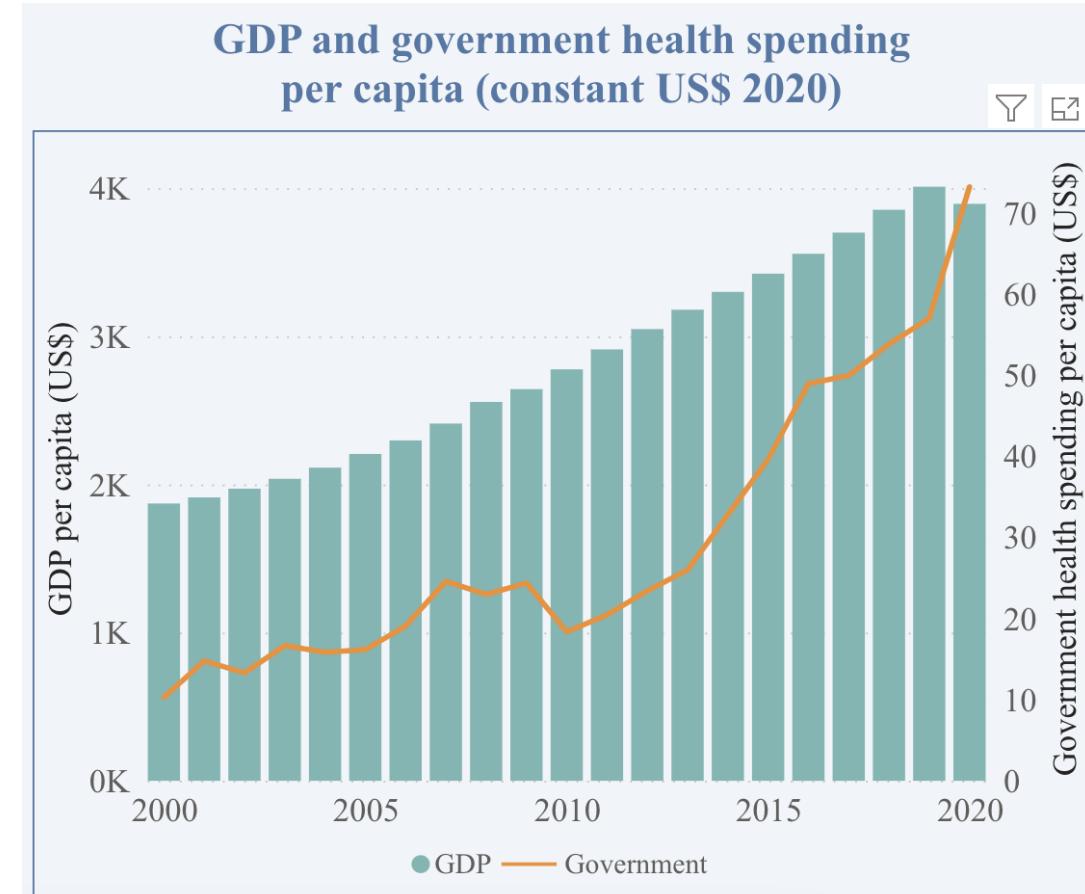


GDP Indonesia



UNIVERSITAS GADJAH MADA

	2005	2010	2015	2020
Health spending US\$ per capita (CHE)	34	86	97	133
Government health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	28.9%	23.7%	39.6%	55.0%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	55.3%	60.6%	43.0%	31.8%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	4.2%	3.9%	6.6%	10.1%
GDP US\$ per capita	1,359	3,094	3,323	3,894



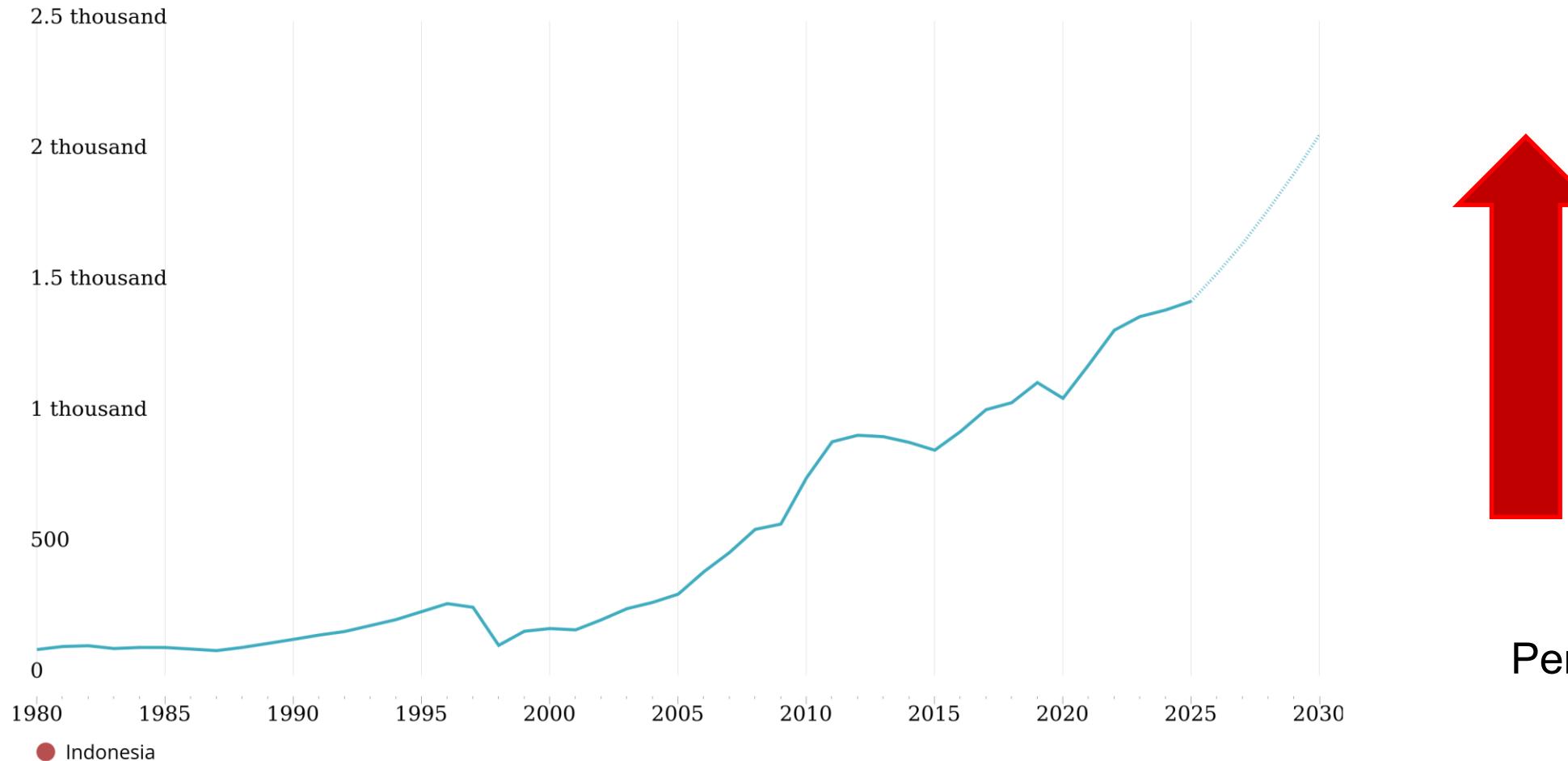
GDP Indonesia



UNIVERSITAS GADJAH MADA

IMF DataMapper

GDP, current prices (Billions of U.S. dollars)



Pertumbuhan

Indonesia

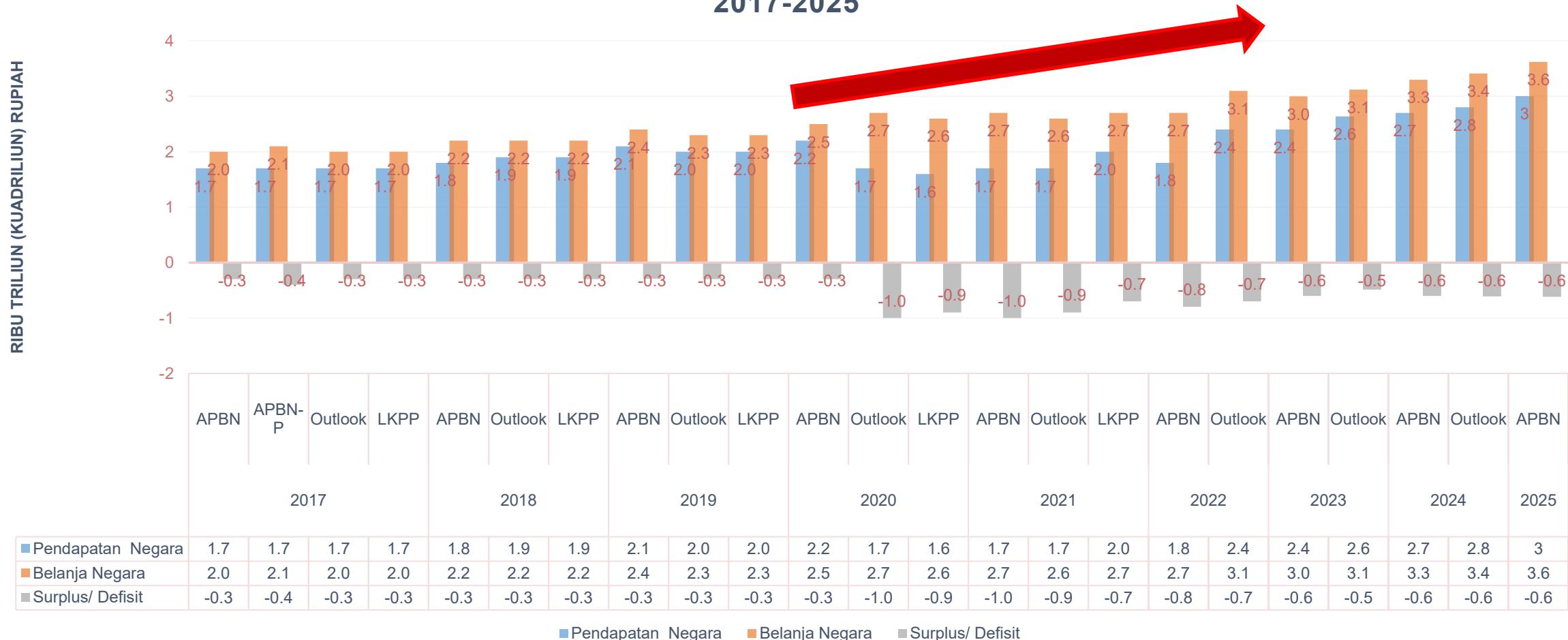
©IMF, 2025, Source: World Economic Outlook (April 2025)

Kondisi APBN 2017 - 2025



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017-2025

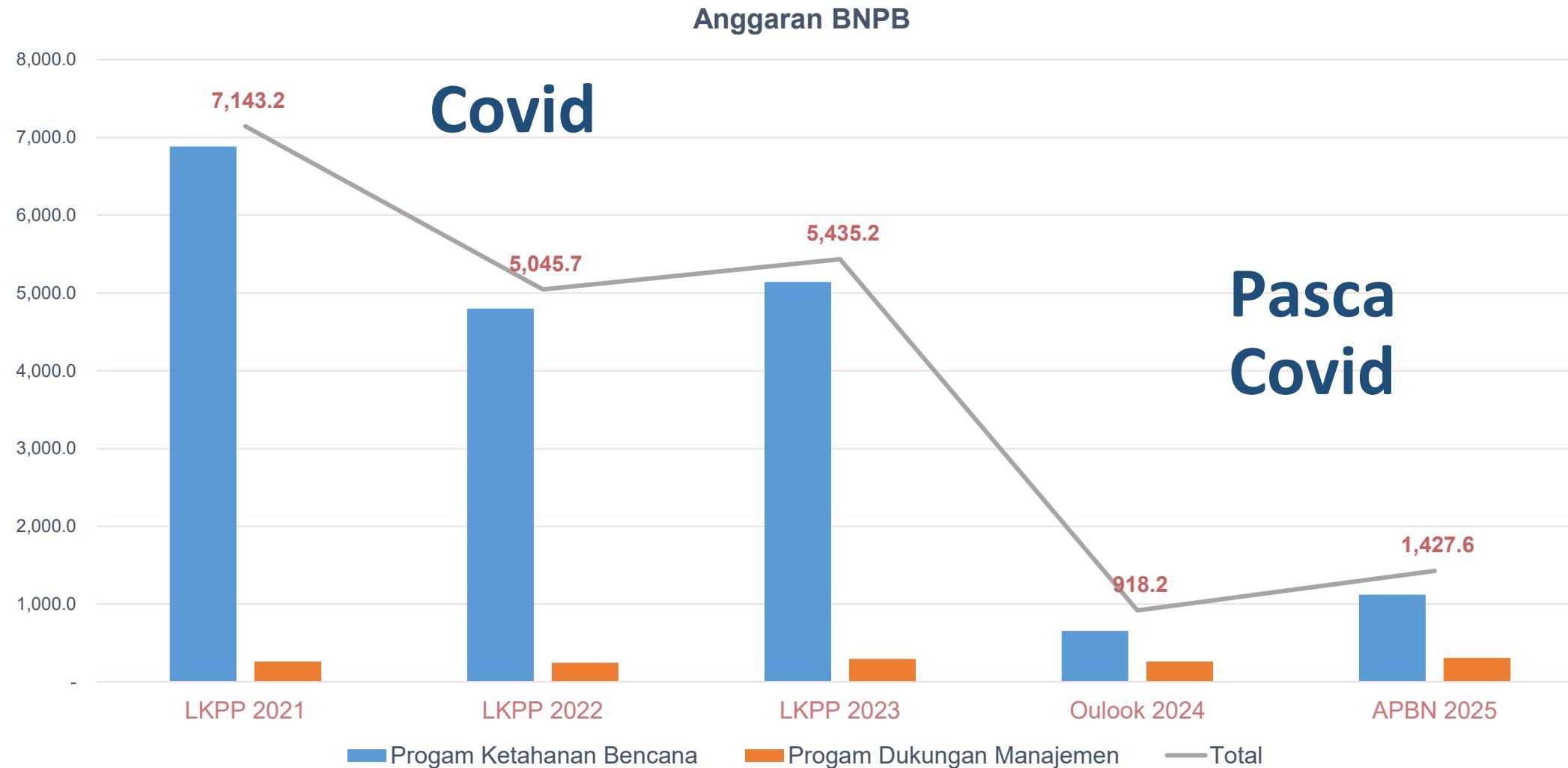


Sumber: Kemenkeu, 2025

Anggaran BNPB- APBN



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Sumber: Kemenkeu, 2025



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Proses penganggaran

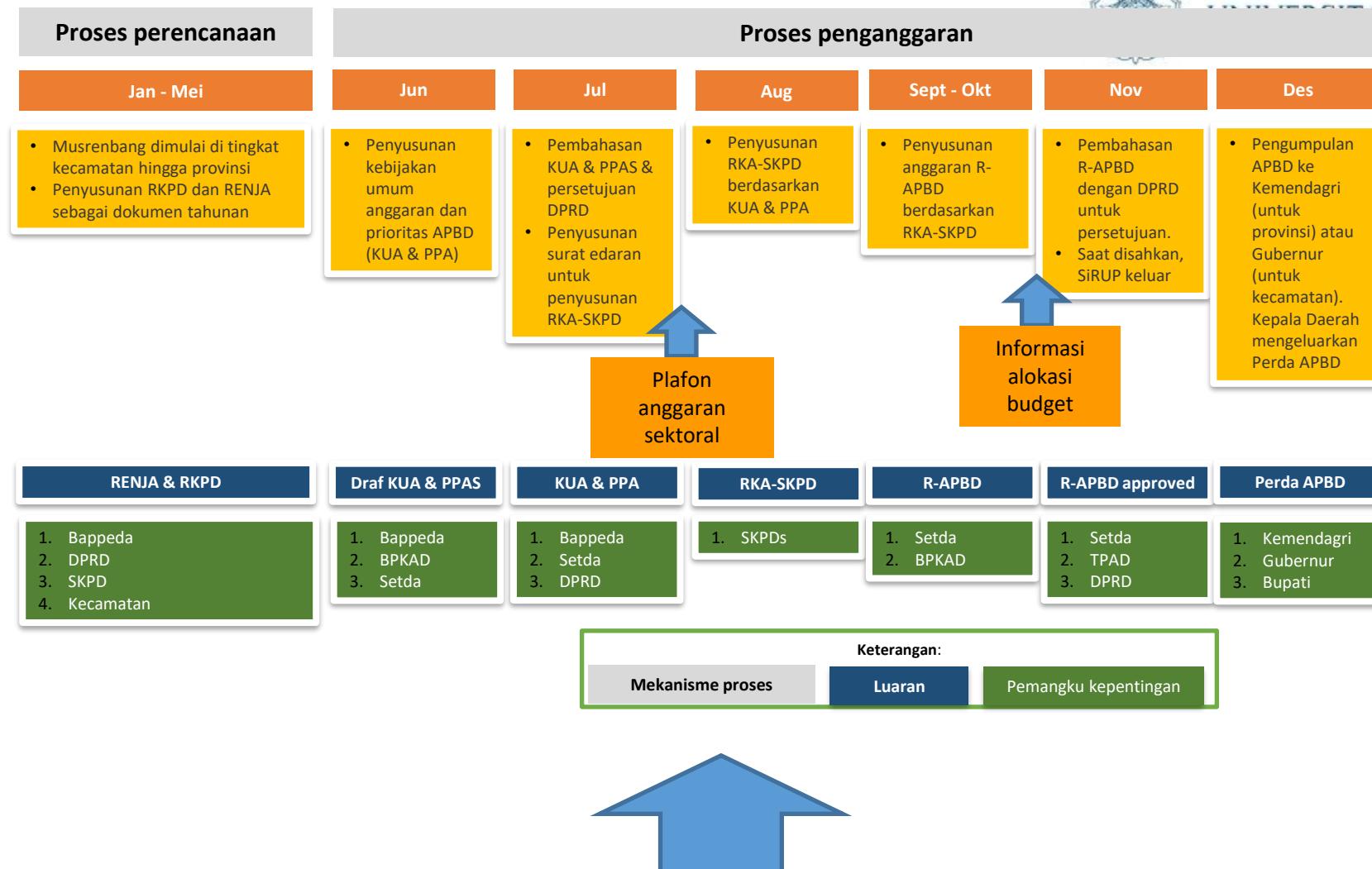


Proses penganggaran nasional : Tantangan untuk menjamin ketercukupan, ketepatan, keterpaduan dan kesinambungan

Jan-Apr	Mei-Jul	Agust-Okt	Nov-Des
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan arah kebijakan, asumsi, dan prioritas pembangunan• Penyusunan <i>resource & envelope</i> usulan kebijakan APBN• Penyusunan SEB Pagu Indikatif• Penyusunan Renja K/L	<ul style="list-style-type: none">• Pembicaraan pendahuluan APBN dan penyusunan KEM, PPKF, dan RKP• Penyusunan SE Pagu Anggaran K/L (Pagu Sementara)• Penyusunan RKA K/L	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA KL• Penetapan RAPBN• Persetujuan RUU APBN• Penyusunan SE Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif)• Penyesuaian RKA K/L	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan SP RKA K/L• Penyusunan dan penetapan Keppres Rincian ABPP• Penyusunan DIPA
<ul style="list-style-type: none">• Presiden• Bappenas• DJA• K/L	<ul style="list-style-type: none">• DPR• DJA• K/L	<ul style="list-style-type: none">• DPR• Presiden• DJA• K/L	<ul style="list-style-type: none">• Presiden• DJA• K/L

Sumber :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Menjamin ketersediaan sumber daya untuk implementasi perencanaan

TIMELINE – Tepat Waktu



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Januari

Pemerintah pusat

- Rakontek antara OPD dengan kementerian terkait
- Formulasi RKP (untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah pada bulan Mei)

Pemerintah daerah:

- Rakontek dengan K/L terkait



Februari – Mei

Pemerintah pusat

- Formulasi anggaran
- Finalisasi RKP sebagai acuan bagi pemerintah daerah

Pemerintah daerah

- Musrenbang
- Finalisasi RKP

- Perbedaan prioritas dan target antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Kurangnya koordinasi antar unit didalam K/L, OPD
- Kurangnya koordinasi multi sektor antar K/L, OPD

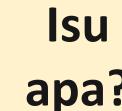
Juni – Juli

Pemerintah pusat

- Persetujuan anggaran

Pemerintah daerah

- Persetujuan KUA & PPAS



Agustus – Desember

Pemerintah daerah

- Formulasi RKA OPD
- Pembahasan budget dgn DPRD
- Persetujuan anggaran (oleh DPRD dan pemerintahan ditingkat atas)
- Penetapan Perda



- Kurangnya sumber daya manusia untuk menyusun perencanaan program ketahanan kesehatan dan penganggarannya
- Kurangnya baiknya koordinasi baik didalam OPD maupun antar OPD
- Pemahaman DPRD yang kurang tentang ketahanan kesehatan
- Penetapan DPA yang tidak tepat waktu



2

Sumber dana

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Pemetaan Sumber, jenis dan penggunaan dana bencana

- Memastikan besaran dana
- Kawal dana
- Realisasi

Jenis Dana	Lembaga Terkait	Penggunaan
Dana penanggulangan bencana ^{1,2}	a. National : APBN (BNPB, kementerian dan Lembaga terkait) b. Sub-national : APBD (BPBD, Organisasi Perangkat Daerah terkait)	<ul style="list-style-type: none">• Pra-bencana• Tanggap darurat• Pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)
Dana kontijensi bencana ^{1,2}	a. National : APBN (BNPB, kementerian dan Lembaga terkait) b. Sub-national : APBD (BPBD, Organisasi Perangkat Daerah terkait)	<ul style="list-style-type: none">• Pra bencana – situasi terdapat potensi bencana – kegiatan kesiapsiagaan
Dana siap pakai ^{1,2,3}	a. BNPB b. BPBD	<ul style="list-style-type: none">• Tanggap darurat (pengadaan barang dan jasa)
Dana bantuan social berpola hibah ^{1,2,4}	a. BNPB	<ul style="list-style-type: none">• Pasca bencana
Dana masyarakat ^{1,2,5,6}	a. BNPB b. BPBD	<ul style="list-style-type: none">• Prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana
Dana lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah ^{1,2,7}	a. Pra-bencana dan Pasca bencana : BNPB, Kementerian dan Lembaga terkait b. Tanggap darurat : BNPB	<ul style="list-style-type: none">• Pra-bencana• Tanggap darurat• Pasca bencana



Pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia :

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontijensi
3. Dana On-call
4. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari masyarakat
6. Dana dukungan komunitas internasional
7. Filantropi

Disaster Pooling Fund atau Pooling Fund Bencana (PFB)



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Instrumen pendanaan bencana di Indonesia yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber (pemerintah pusat, daerah, swasta, dll.) untuk dikelola secara berkelanjutan
- Dana ini **berfungsi** sebagai dana pengumpul, pengembang, dan penyalur untuk pemberian kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, termasuk pembayaran premi asuransi aset negara dan daerah untuk memindahkan risiko bencana ke pihak ketiga
- PFB juga memiliki kemampuan untuk **mentransfer** risiko bencana ke pasar keuangan melalui pengasuransian aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD).
- PFB dikelola oleh sebuah unit pengelola dana di bawah Kementerian Keuangan, yaitu [BPDLH \(Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup\)](#).
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada 13 Agustus 2021.

Dana PFB dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025



UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA

Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dana Bersama adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

01 pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa

05 penyediaan penunjuk jalur evakuasi

08 pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

02 alat pemadam api ringan di Desa

06 kegiatan tanggap darurat bencana alam

09 rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

03 pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana

07 penyediaan tempat pengungsian

10 sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

04 pembangunan jalan evakuasi

**Dana Desa Untuk
Mitigasi dan
Penanganan
Bencana Alam
dan Non Alam**





Dana Filantropi

ide, kegiatan, atau aksi yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan melibatkan pengorbanan-pengorbanan, baik pengorbanan waktu, biaya, pengalaman, keterampilan, jaringan, untuk membuat dunia menjadi lebih baik (LAAF, 2014).



Potensi Pemanfaatan

- Menaikkan Premi PBPU dan memperbesar
- Menambah Out-of-Pocket, termasuk cost-sharing
- Mekanisme Public-Private-Partnership untuk infrastruktur

Sumber Dana

Donasi:

- Oleh perorangan
- Oleh Badan Usaha
- Oleh Lembaga
- ...dll

- Masyarakat/Badan Usaha mampu
- Organisasi keagamaan
- Organisasi kemasyarakatan (berbasis keluaraga, kedaerahan, dll)
-dll



Permensos No. 8/2021 Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 3

1. Penyelenggaraan PUB dilaksanakan masyarakat oleh Ormas yang berbadan hukum.
2. Ormas yang dimaksud: perkumpulan atau yayasan.
3. Penyelenggaraan PUB harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan.



Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin:

1. Zakat
2. Pengumpulan dalam tempat peribadatan
3. Keadaan darurat di lingkungan terbatas
4. Gotong-royong di lingkungan terbatas (sekolah, kantor, RW atau tetangga, kelurahan atau desa)
5. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan



Berbagai Bentuk Badan Usaha

- *Vennotschaap* (korporasi, koperasi, CV, firma)
- *Vereniging* (perhimpunan, paguyuban, serikat)
- *Stichting* (yayasan):
 1. Nirlaba
 2. Tidak memiliki anggota
 3. Deviden kembali ke yayasan

Sumber: Visnu, 2023



Beberapa contoh lembaga filantropi di Indonesia, antara lain:

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah
- LazisMu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah)
- Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang merupakan lembaga nirlaba dan independen

Selain lembaga filantropi, ada juga beberapa organisasi masyarakat dan sosial yang bergerak di bidang filantropi, seperti:

- Yayasan Tanoto
- Yayasan Tifa
- HarapanMembantu
- Wahana Visi Indonesia
- Yayasan Plan Internasional Indonesia
- Dompet Dhuafa
- Yayasan Pertamina
- Selamatkan Anak-Anak Indonesia



3

Mekanisme pembiayaan

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Pemetaan Aliran dana



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sumber dana

Domestik

- Dana penanggulangan bencana
- Dana kontijensi

- Dana siap pakai
- Dana sektor swasta
- Dana masyarakat
- *Dana bantuan sosial berpola hibah*

External

- Donor

Agen

National agency

- Kementerian dan lembaga terkait
 - Kemenko PMK
 - Kemenko Polhukam
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Pertanian
 - Kementerian Kelautan dan perikanan
 - Kementerian LH dan Kehutanan
 - BATAN
 - BAPETEN
 - dst

- BNPB

Sub-national agency

- Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Perikanan
 - dst

- BPBD

Penyedia

- Institusi/fasilitas kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan milik pemerintah :

- Berbasis masyarakat
- Berbasis outreach
- Berbasis klinik/individu

- Institusi/fasilitas kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan milik swasta:

- Berbasis masyarakat
- Berbasis outreach
- Berbasis klinik/individu

- Institusi/fasilitas kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan milik LSM, :

- Berbasis masyarakat
- Berbasis outreach
- Berbasis klinik/individu

Fungsi

PENCEGAHAN

DETEKSI

RESPON

PEMULIHAN



Proses Aliran Dana Siap Pakai

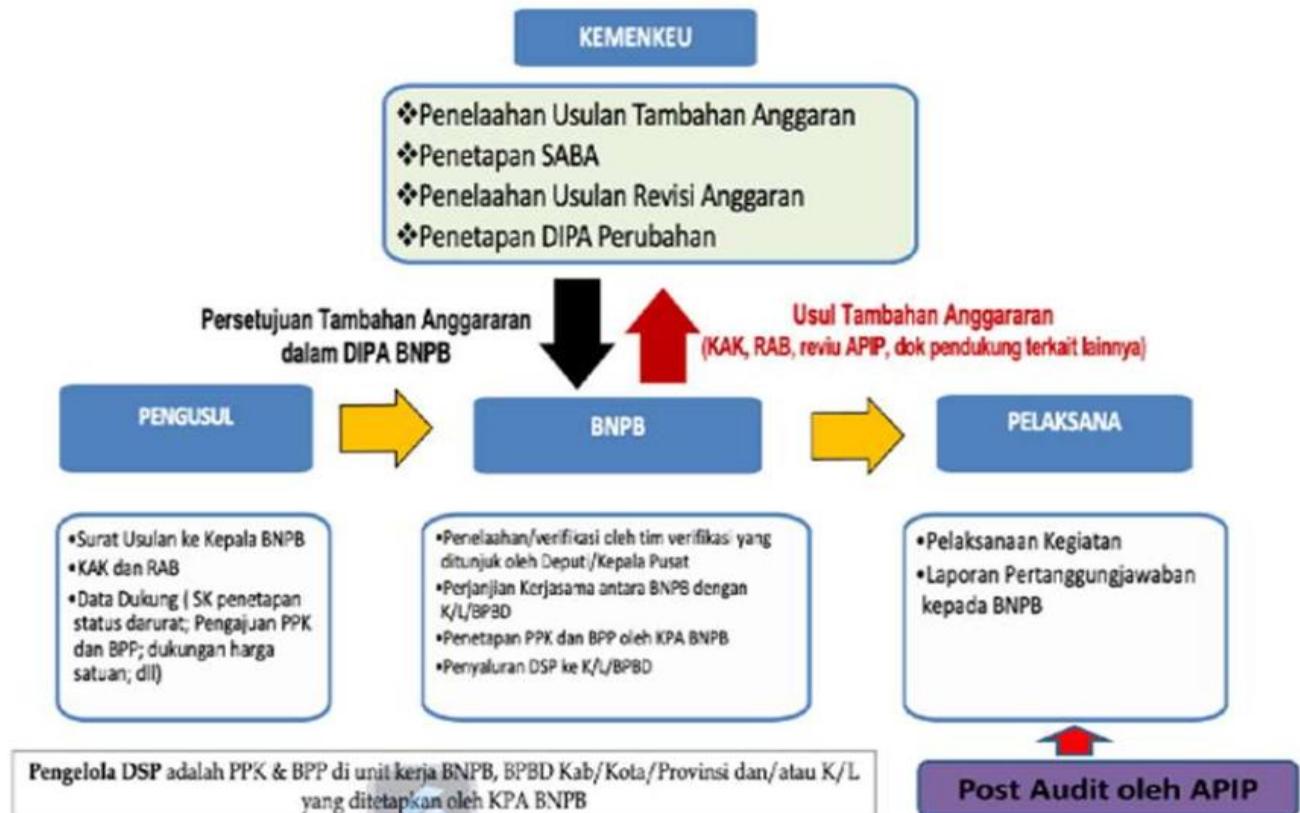
1. Pengajuan permintaan **Dana Siap Pakai** oleh pemerintah daerah kepada Kepala BNPB.
2. Penetapan besarnya pemberian **Dana Bantuan Siap Pakai** dilakukan oleh Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran. Besarnya bantuan ditetapkan berdasarkan usulan dari daerah/instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari BNPB.
3. Penyaluran bantuan **Dana Siap Pakai** dari BNPB diserahkan secara langsung kepada provinsi/kabupaten/kota yang terkena bencana dapat dalam bentuk uang, barang dan jasa.
4. Penanggung jawab pengelolaan bantuan **Dana Siap Pakai** adalah Kepala BPBD tingkat Provinsi dan atau Kepala BPBD tingkat Kabupaten/Kota. Instansi/lembaga pemerintah terkait dalam mengelola bantuan Dana Siap Pakai dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
5. Pertanggungjawaban **Dana Siap Pakai** dilakukan dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

Dana Siap Pakai - Pusat

DANA SIAP PAKAI

“ dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB ”

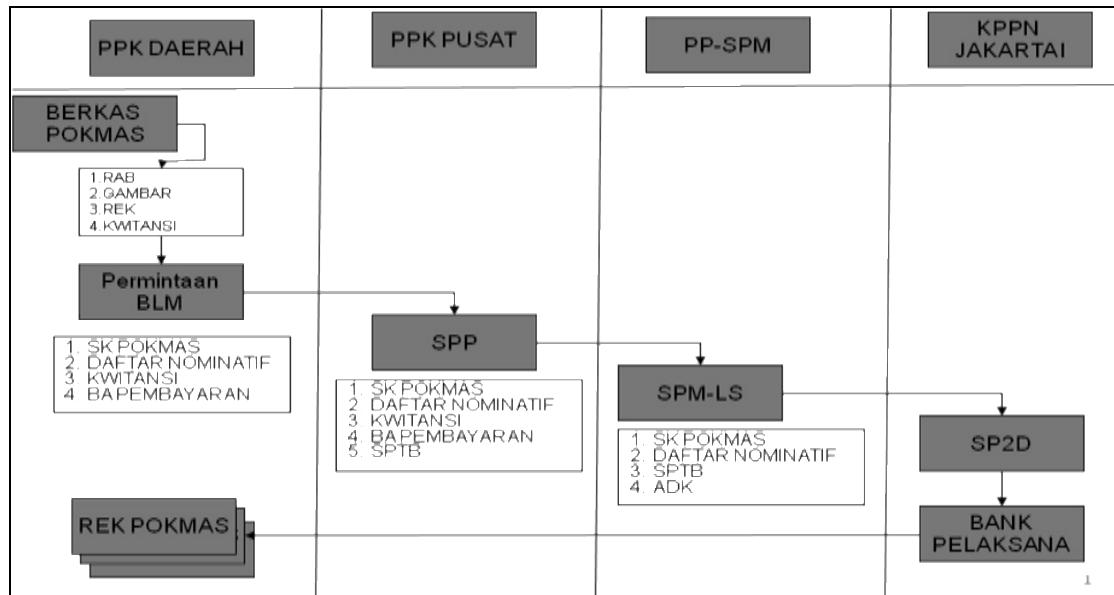
Penggunaan APBN - BNPB



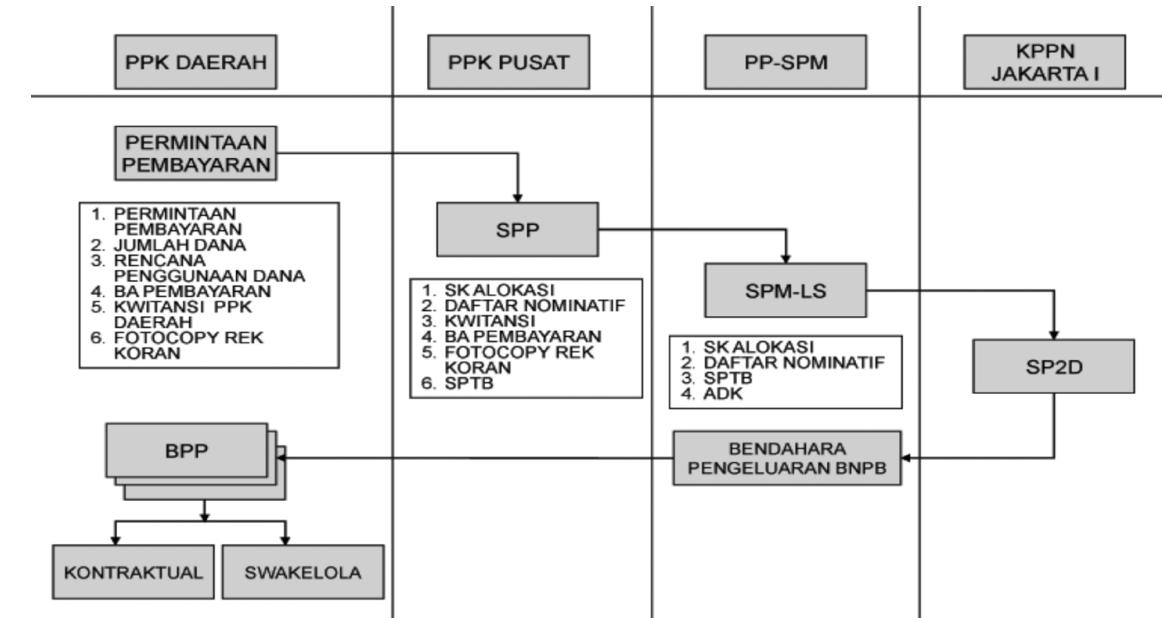
Aliran Dana Bansos Berpola Hibah



Bagan alur pencairan bantuan langsung masyarakat



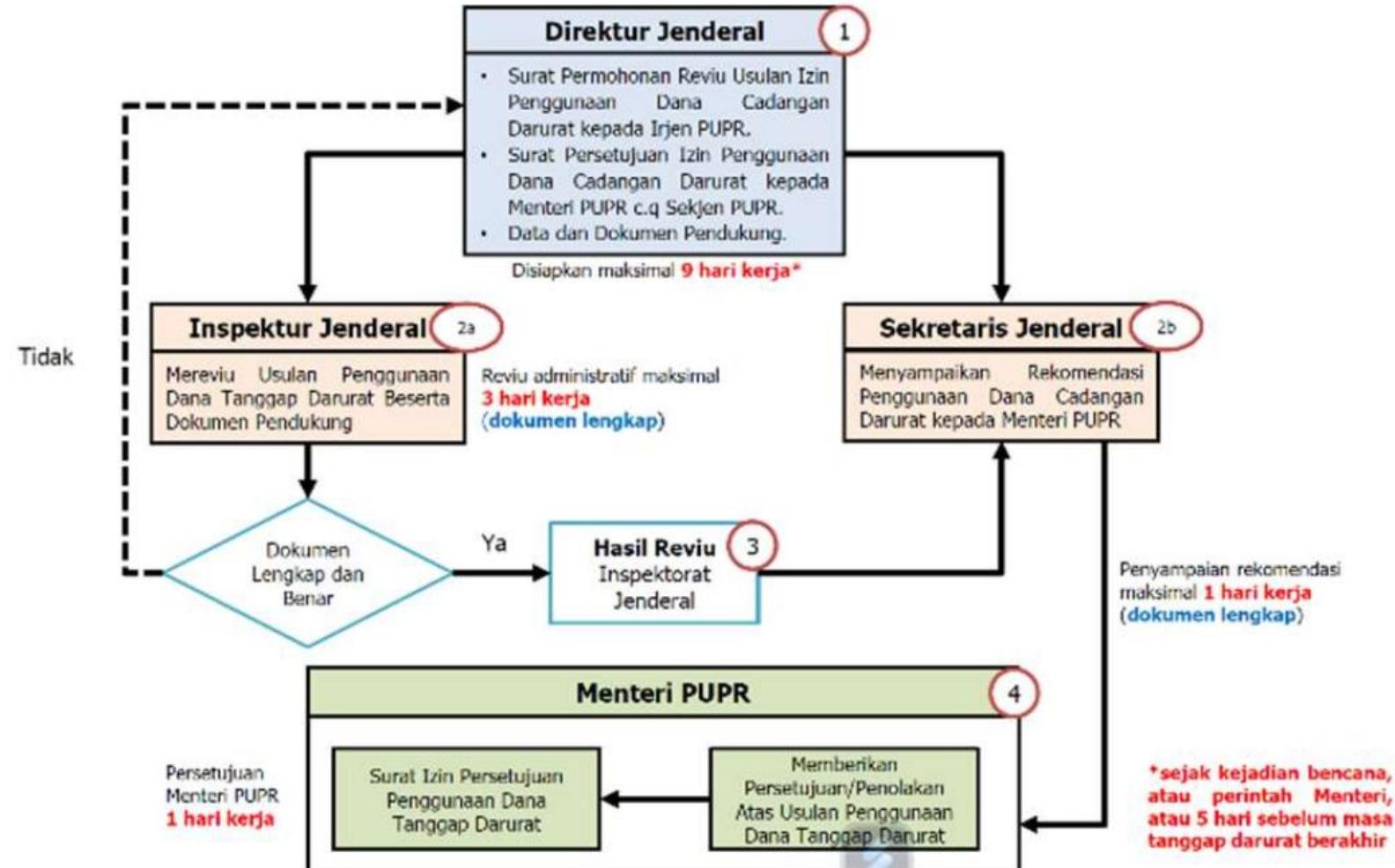
Bagan alur pencairan non-bantuan langsung masyarakat



Tantangan dan peluang untuk meningkatkan koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan agar distribusi bantuan sosial pasca bencana dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

Dana Bencana Kementerian

ALUR MEKANISME
PENGAJUAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN TANGGAP DARURAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 10 Tahun 2017)





Skema Pooling Fund Bencana



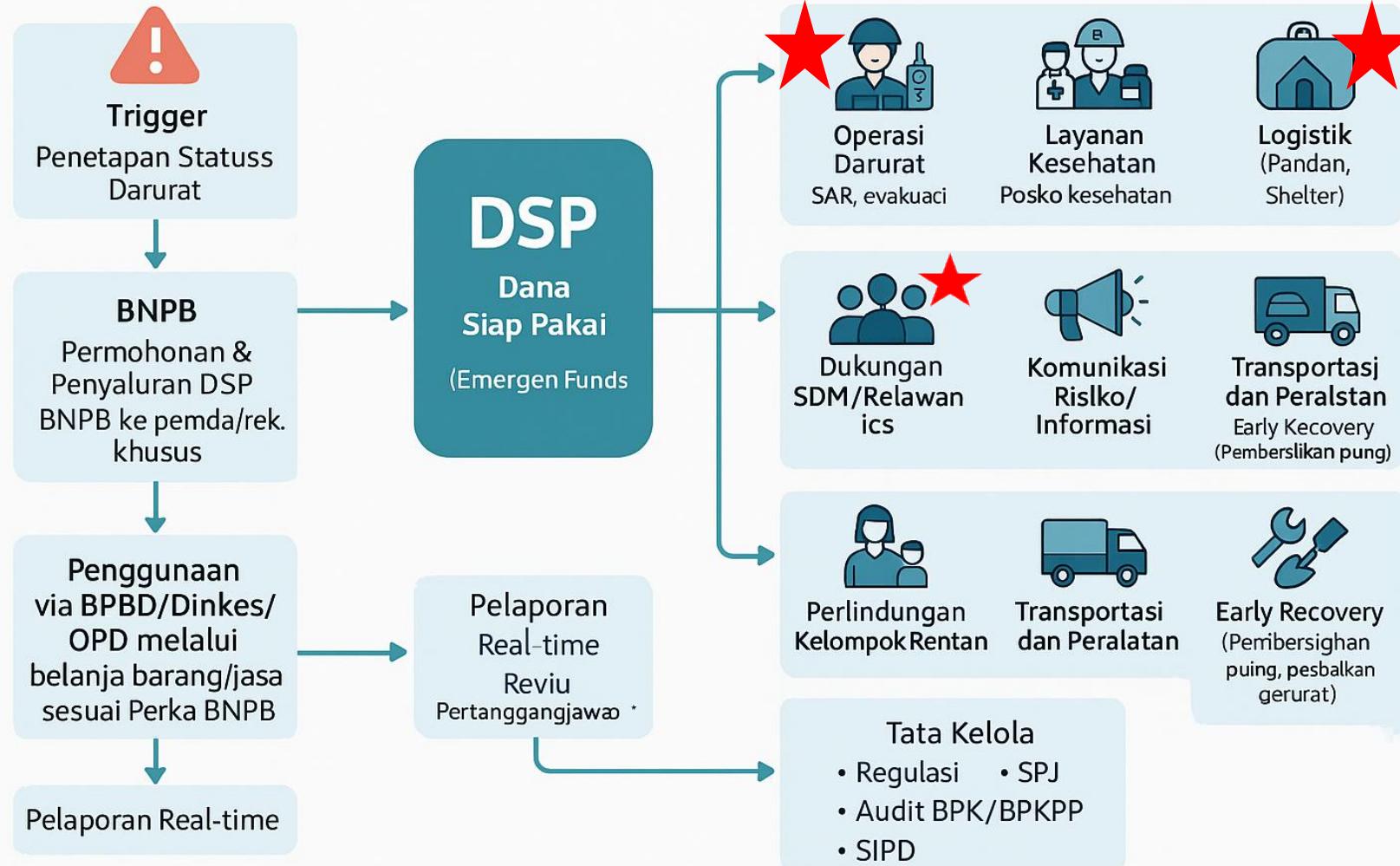
Sumber: Kemenkeu, 2024

Dana Siap Pakai



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Penggunaan Dana Siap Pakai di Pemerintah Daerah



- Perlu pengawasan -> siapa yang mengawasi → cukup dari Pemerintah atau dibutuhkan pengawas lain Titik rawan korupsi dan penyelewengan*

PENGGUNAAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



UNIVERSITAS GADJAH MADA

PEMERINTAH DAERAH



FASE TANGGAP
DARURAT SELESAI



PENGGUNAAN DANA

- PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
- PERBAIKAN RUMAH
- PERBAIKAN FASILITAS UMUM

- Perlu pengawasan pemerintah dan non pemerintah
- Titik rawan korupsi
- Keterlibatan sektor swasta



4

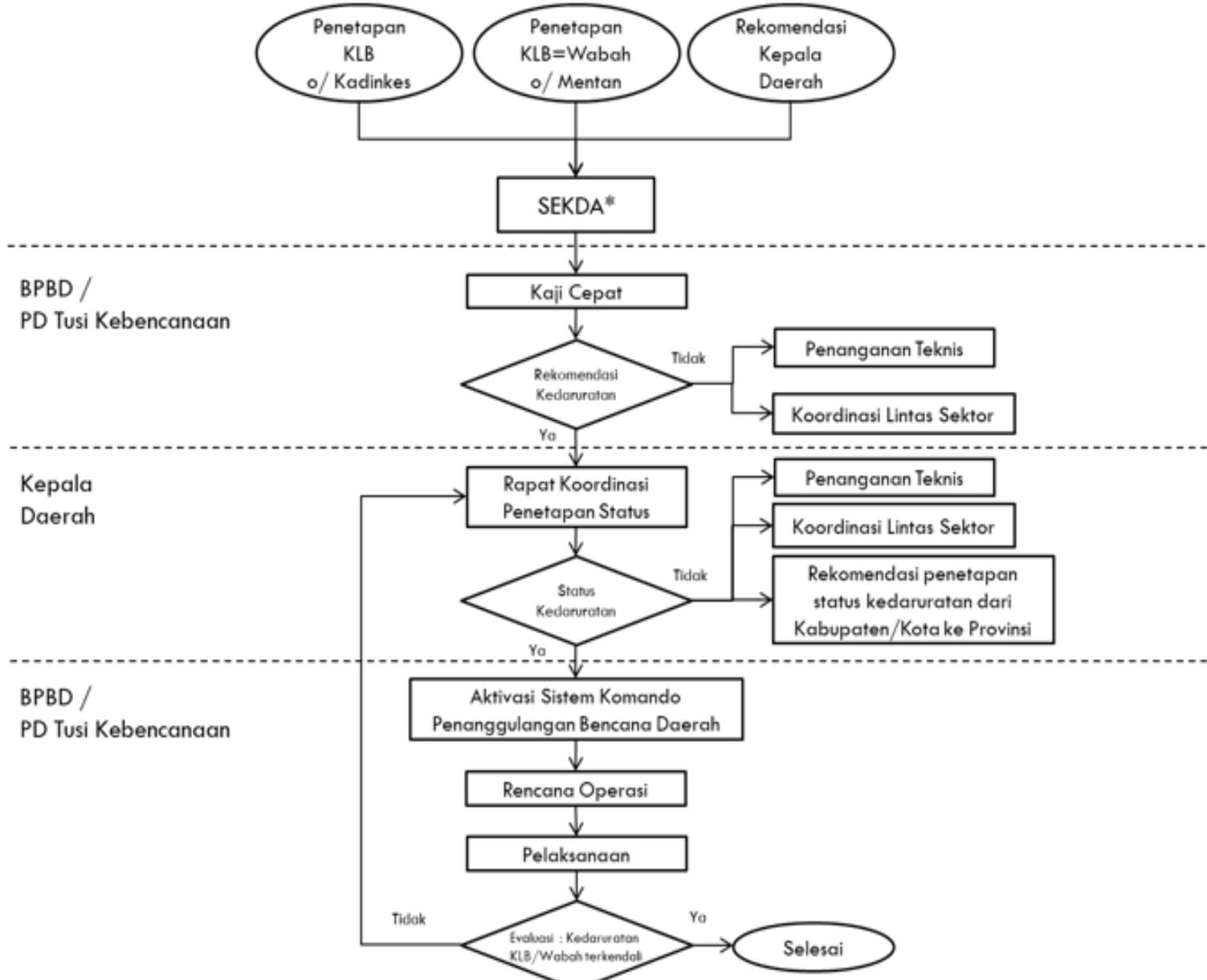
Kasus

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Ketersediaan anggaran bencana



Alur Koordinasi KLB/Wabah di Tingkat Daerah (Sumber: Kementerian Koordinator PMK, 2018)

Pembangunan Ketahanan Kesehatan berdasar 4 Fungsi di tingkat Provinsi



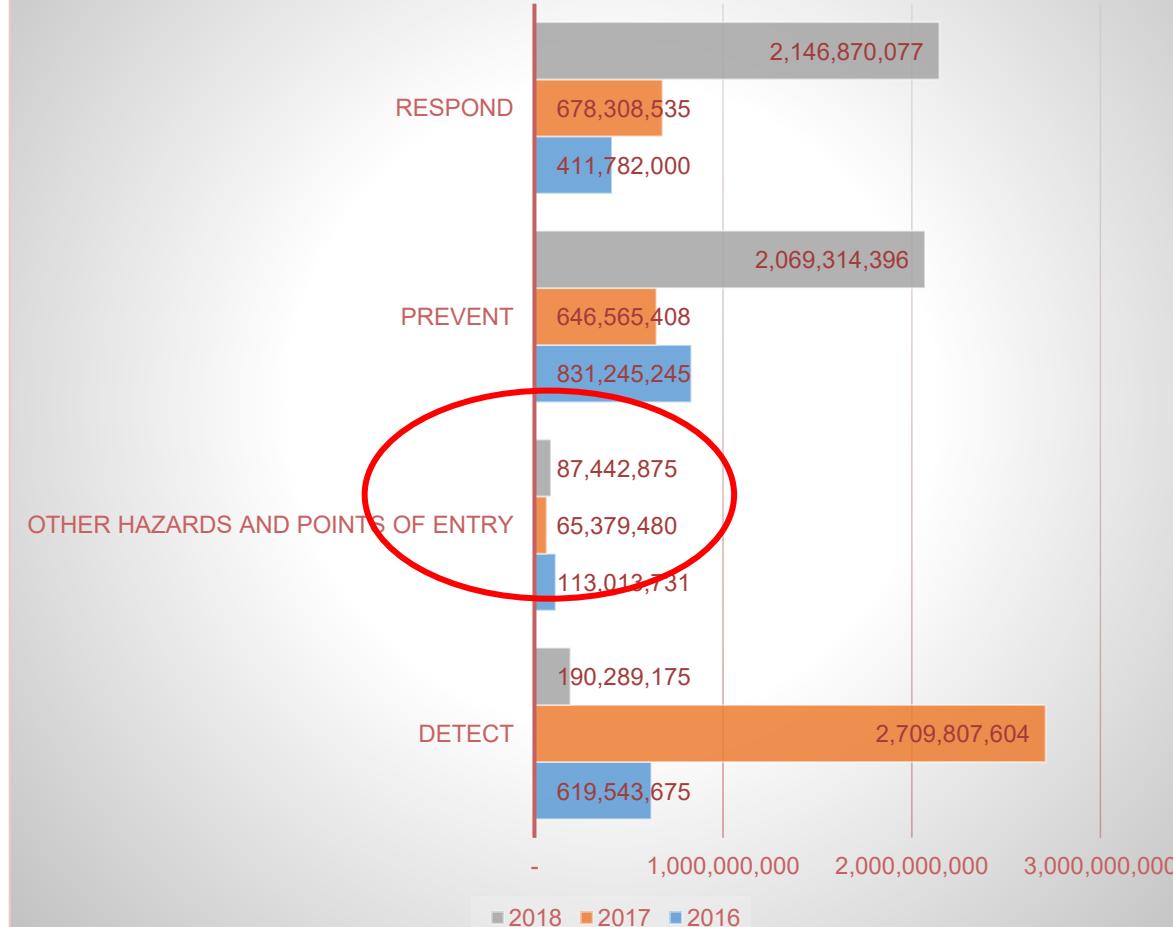
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menunjukkan alokasi dana tersedia di Pencegahan, Deteksi dan Respon

Menunjukkan bahwa Pemda telah berupaya untuk mengalokasikan dana di semua kelompok

Diharapkan Pemda mengalokasi dana untuk Deteksi, Bahaya lain dan PoE

Allocation of Funds for 4 Functions in Health Security



Alokasi Dana di Setiap SKPD

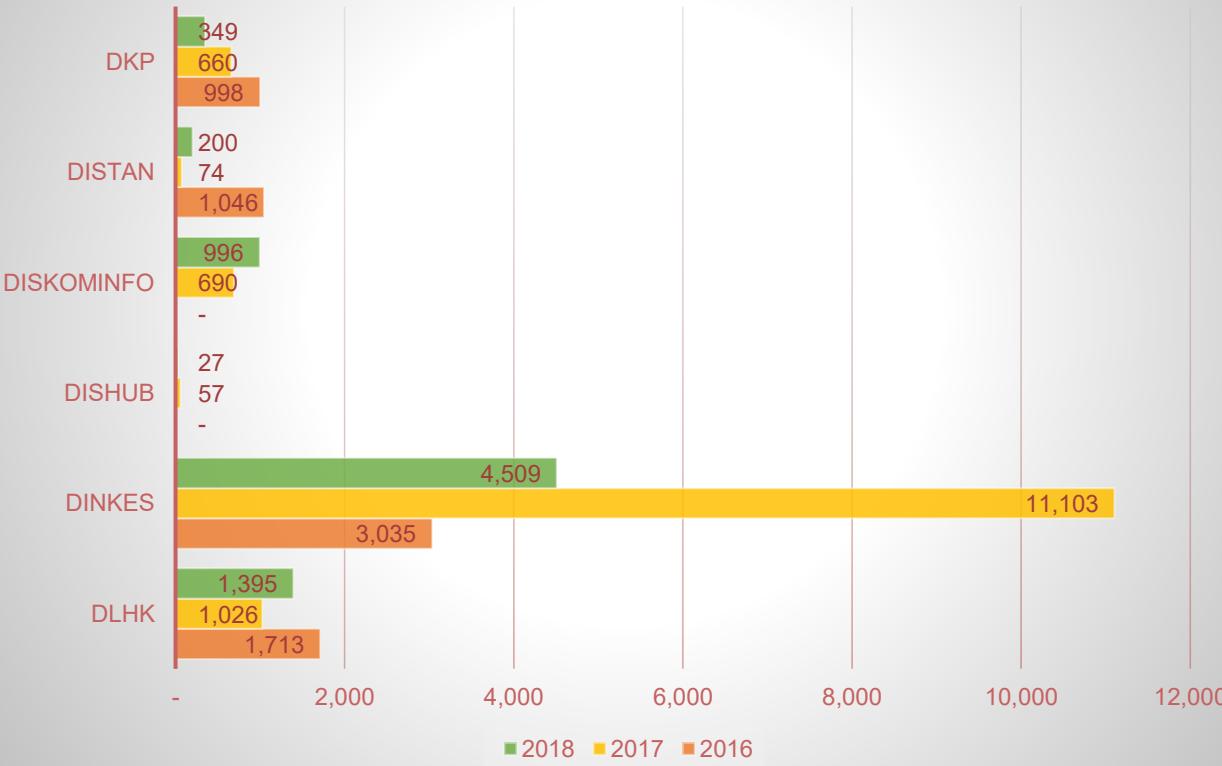


UNIVERSITAS GADJAH MADA

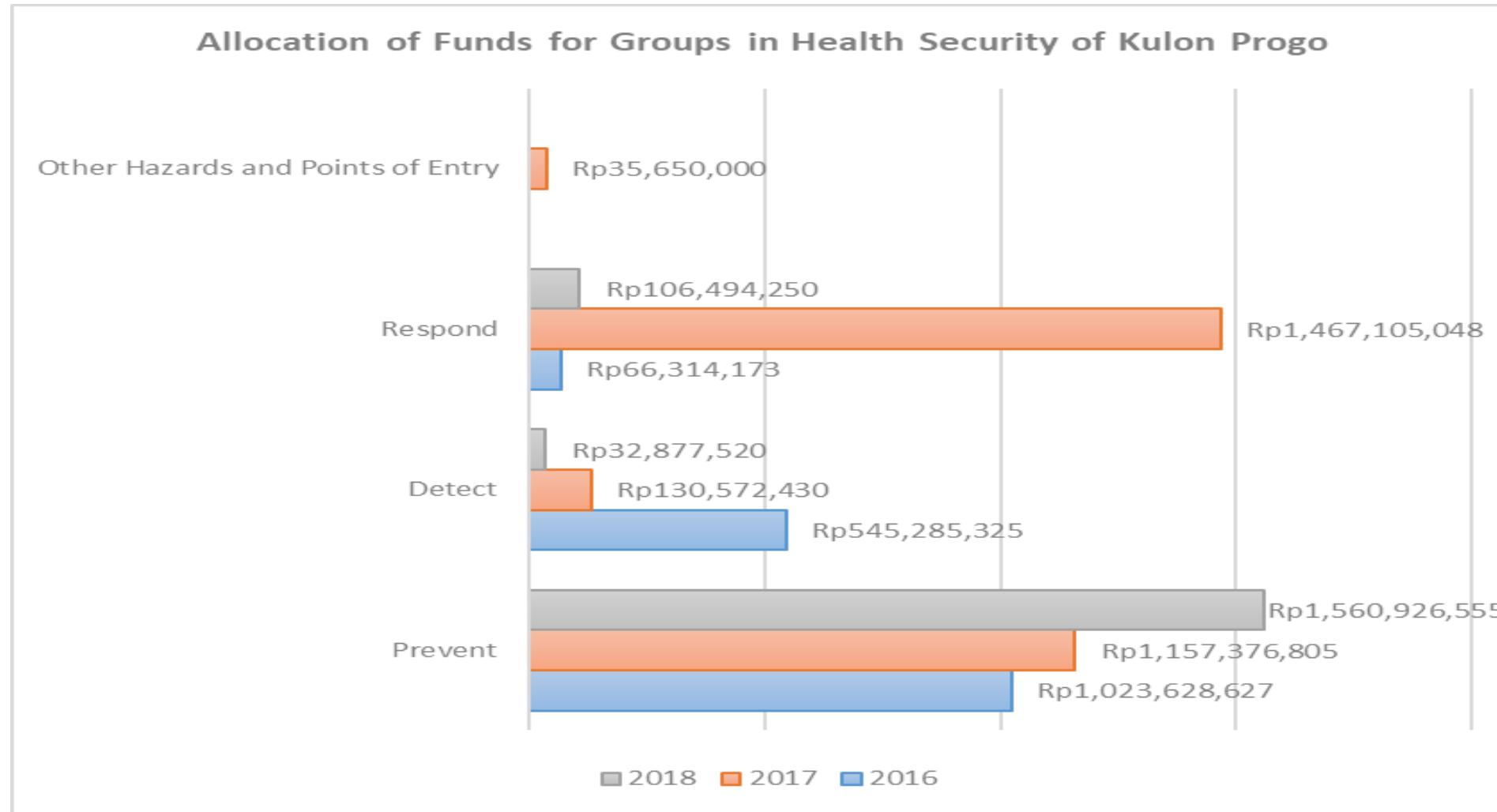
Alokasi dana Ketahanan
Kesehatan terbesar ada di Dinas
Kesehatan

Pemberian peran dan komitmen
SKPD lain dalam upaya ketahanan
kesehatan perlu terus dijaga
dengan tetap memberikan alokasi
anggaran sesuai dengan tupoksi.

Besaran Alokasi Dana Ketahanan Kesehatan di SKPD DI Yogyakarta (juta Rupiah)



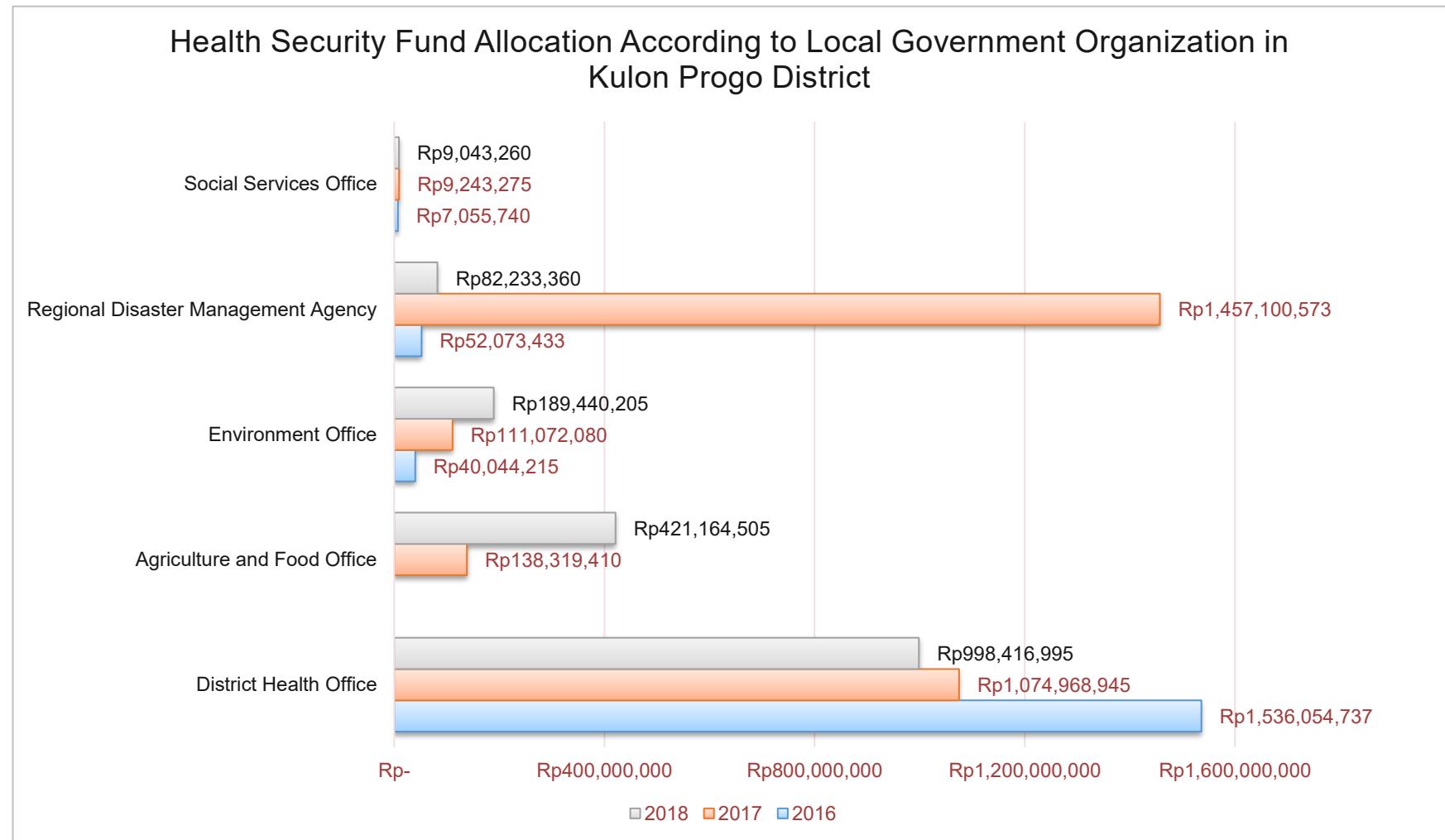
Sumber: Dokumen DPA SKPD DIY, 2019



Sumber: Dokumen DPA SKPD Dinas Pemda, 2016-2018; PKMK 2019



Kondisi Ketersediaan Dana Ketahanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota





UNIVERSITAS GADJAH MADA

DANA SIAP PAKAI / DANA DARURAT



PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG
PEDOMAN
PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB dapat diserahkan secara langsung kepada provinsi/kabupaten/kota yang terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi (lampiran 1), dan berita acara penyerahan bantuan uang (lampiran 2).
2. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi, Berita Acara Serah Terima serta Nota Kesepahaman.
3. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (lampiran 3).
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (lampiran 4).



Refocusing dan Realokasi APBN

APBN difokuskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi



Pendapatan Negara	Tumbuh -10%	<ul style="list-style-type: none">Penerimaan Perpajakan tumbuh -5,4% akibat pelemahan ekonomi dan dukungan insentif perpajakanPenerimaan PNBP tumbuh -26,9% akibat jatuhnya harga komoditas dan insentif penurunan harga gas industri												
Belanja Negara	255,1 T melalui realokasi belanja dan tambahan belanja Covid-19	<ul style="list-style-type: none">Penghematan belanja K/L 95,7 T, a.l.:<ul style="list-style-type: none">➤ Pemotongan belanja barang 52 T (a.l. Perjadin, paket meeting)➤ Pemotongan belanja modal 42,6 T <table><thead><tr><th>DBH turun 27,8 T</th><th>Mengikuti penurunan penerimaan negara</th></tr></thead><tbody><tr><td>DAU turun 42,7 T</td><td>Penghematan 10%</td></tr><tr><td>DAK Fisik turun 18 T</td><td>Pemotongan 25%</td></tr><tr><td>DAK NF turun 1,5 T</td><td>Penghematan alamiah</td></tr><tr><td>Otsus dan DIY turun 1,9 T</td><td>Penyesuaian dengan pagu DAU</td></tr><tr><td>Dana Desa turun 0,8 T</td><td>Penghematan alamiah</td></tr></tbody></table>	DBH turun 27,8 T	Mengikuti penurunan penerimaan negara	DAU turun 42,7 T	Penghematan 10%	DAK Fisik turun 18 T	Pemotongan 25%	DAK NF turun 1,5 T	Penghematan alamiah	Otsus dan DIY turun 1,9 T	Penyesuaian dengan pagu DAU	Dana Desa turun 0,8 T	Penghematan alamiah
DBH turun 27,8 T	Mengikuti penurunan penerimaan negara													
DAU turun 42,7 T	Penghematan 10%													
DAK Fisik turun 18 T	Pemotongan 25%													
DAK NF turun 1,5 T	Penghematan alamiah													
Otsus dan DIY turun 1,9 T	Penyesuaian dengan pagu DAU													
Dana Desa turun 0,8 T	Penghematan alamiah													
Defisit	5,07%	<ul style="list-style-type: none">Penguatan belanja penanganan Covid-19 (kesehatan, bansos) <p>Pembiayaan anggaran untuk pemulihan ekonomi</p>												

Sumber : Kemenkeu, 2020

PKMK, 2020



Penyesuaian APBD

Kemenkeu bersama Kemendagri mengeluarkan SKB untuk mewajibkan seluruh Pemda melakukan penghematan belanja barang/jasa, belanja modal, serta normalisasi belanja pegawai dan merealokasi hasilnya untuk penanganan dampak COVID-19

Deskripsi	Sebelum	Sesudah	% Penyesuaian
Pendapatan	1,250.29	1,051.15	-15.93%
- PAD	331.39	235.71	-28.87%
- TKDD	782.40	695.84	-11.06%
- Lainnya	136.50	119.60	-12.38%
Belanja	1,298.26	1,070.27	-17.56%
- Belanja Pegawai	426.77	403.56	-5.44%
- Belanja Barang/Jasa	318.41	207.54	-34.82%
- Belanja Modal	235.66	124.18	-47.31%
- Belanja Lainnya	317.42	335.00	5.54%

(Rp Miliar)

Total belanja APBD di 477 daerah yang direalokasi dan *refocusing* sebesar **Rp71,72 T** dan digunakan untuk:



- Secara nasional, pendapatan daerah turun 15,94%, termasuk penurunan PAD yg cukup dalam 28,87%, khususnya di Jawa-Bali dengan tingkat pandemi tinggi.
- Pada sisi belanja, terdapat penurunan 17,56%. Penurunan tertinggi pada belanja barang/jasa dan modal, mencapai 34,82% dan 47,31% untuk direalokasi bagi penanganan COVID-19

Sumber : Kemenkeu, 2020

PKMK, 2020

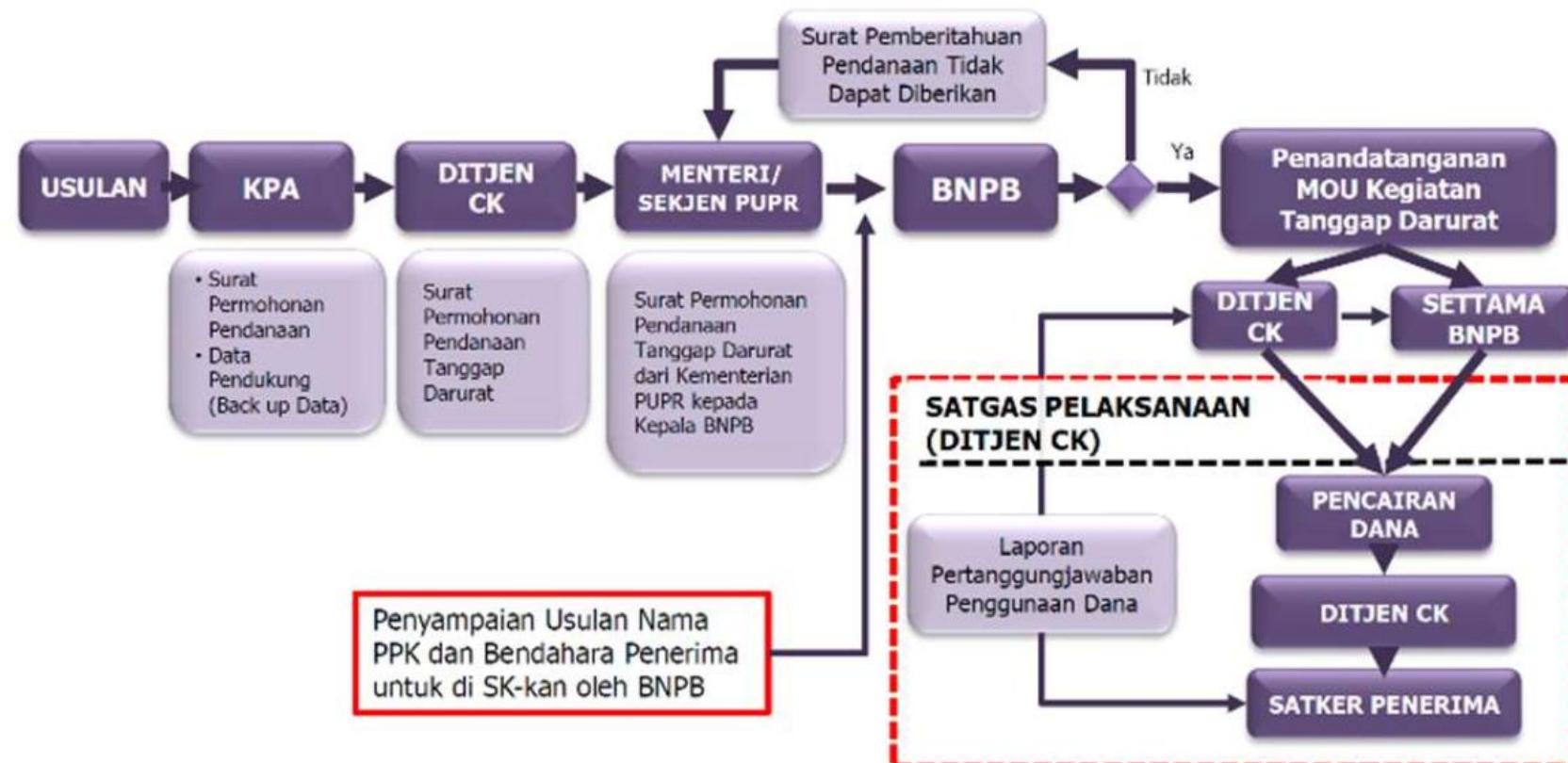


UNIVERSITAS GADJAH MADA

pendanaan bencana di daerah



MEKANISME USULAN PENANGANAN BENCANA MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB di daerah





Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memberi ruang pada penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana



Provinsi NTB sudah mengeluarkan Pergub Nomor 83 Tahun 2023 tentang **Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Peningkatan Risiko Bencana (PRB)**

- data BPS tahun 2021, dari 75.584 desa di Indonesia, tercatat sebanyak 13.261 (17,54%) desa terdampak banjir, 7.827 (10,35%) terdampak gempa bumi, dan 5.865 (7,76%) desa terdampak tanah longsor



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp/Fax (0752) 9069

Nomor : 360/၂၁၁/BPBD-LK/IX-2022
Lamp : -
Perihal : **Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan Bantuan Keuangan Pasca Bencana**

Payakumbuh, 23 September 2022

Kepada Yth :
Sdr. Wali Nagari
Se-Kab.Lima Puluh Kota
di
- Tempat

Dengan Hormat,

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Indeks Resiko Bencana yang cukup tinggi di Sumatera Barat yang mengakibatkan kerentanan akibat bencana juga tinggi. Oleh karena itu perlu diinformasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Pasca Bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Pasca Bencana.

Berdasarkan hal diatas diminta perhatian dan kerjasama saudara terhadap hal-hal berikut :

1. Jika yang terdampak bencana adalah rumah masyarakat/pribadi maka pelaporan dan pengajuan permohonan bantuan dialamatkan ke BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, kecuali untuk yang terdampak kebakaran dialamatkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan administrasi sebagai berikut :
 - a) Laporan kejadian dari Wali Nagari (yang juga memuat perkiraan kerugian) yang diketahui oleh Camat.
 - b) SK Wali Nagari tentang penetapan kejadian bencana.
 - c) Permohonan bantuan dari masyarakat terdampak yang diketahui Wali Nagari.
 - d) Foto copy KTP/KK
 - e) Foto copy Rekening Aktif
 - f) Foto dokumentasi
 - g) Seluruh dokumen dibuat dalam rangkap 2 (dua)
2. Jika yang terdampak bencana adalah fasilitas umum, maka mekanisme pelaporan dialamatkan kepada dinas teknis yang membidangi fasilitas umum tersebut.

Demikian kami Sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan Bantuan Keuangan Pasca Bencana



Prosedur Pengajuan Dana Stimulan Rumah Korban Bencana

12 Jan 2020 12:13 WIB

© Dilihat 9194 kali

Dana stimulant untuk bencana

REKAPITULASI DATA DAMPAK BANJIR DAN LONGSOR JABODETABEK & LEBAK

Minggu, 12 Januari 2020 Pkl. 06.00 WIB

NO	Wilayah Terdampak	Jumlah Terdampak		Ketinggian Air Maksimal (m)	Ketinggian Air Saat ini (m)	Jumlah Pengungsi		Meninggal	Hilang	Jumlah Titik Pengungsi	Terdampak KK	Jiwa	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan / Desa			KK	Jiwa						
1	Kab Bekasi	0	0	3	0	0	0	1		0	1.355	3.123	Diperbarui
2	Kota Bekasi	0	0	6	0	17	63	9		1	104.114	366.274	Diperbarui
3	Kab. Bogor	24	47	2	0	-	21.742	11		33	1.123	3.384	Diperbarui
4	Kota Tangerang	0	0	3	0	0	0	6		0	24.745	53.931	Diperbarui
5	Kota Tangerang Selatan	0	0	2	0	0	0	4		0	18.045	65.001	Diperbarui
6	Jakarta Timur	0	0	2	0	0	0	8		0	1.588	5.126	Diperbarui
7	Jakarta Barat	1	1	1	0	0	0	4		0	-	-	Diperbarui
8	Jakarta Selatan	0	0	2	0	217	814	1		5	-	-	Diperbarui
9	Jakarta Utara	0	0	0,7	0	0	0	1		0	-	-	Diperbarui
10	Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	0	2		0	-	-	Diperbarui
11	Kab. Lebak	5	8	1	0	1.392	5.106	10	1	11	2.914	11.656	Diperbarui
12	Kota Bogor	0	0	0,8	0	0	0	1		0	0	0	Selesai
13	Kota Depok	0	0	2	0	12	48	3		7	1.306	2.976	Diperbarui
Total		30	56		1.638	27.773	61	1	57		155.190	511.471	

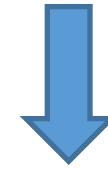
Ket : Lokasi pengungsian di kota Jakarta Selatan berada di Gor Kec Pancoran, Rusun Pengadegan, Madrasah Annasyiatul Ilmiyah, SDN03 Pengadegan dan Yayasan Lia

Foto : Prosedur Pengajuan Dana Stimulan Rumah Korban Bencana ()

JAKARTA - Memasuki hari ke 12 penanganan bencana banjir dan longsor di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten mengalami kemajuan yang baik. Genangan banjir sudah surut di semua lokasi serta jumlah pengungsi juga jauh berkurang.



Hasil pengalihan anggaran
belanja barang di RS TA
2020



Hasil Refocusing dalam
rangka Penanggulangan
Covid – 19 di RS total 7
milyar



- Belanja barang untuk penanganan Covid-19 Rp. 990 juta
- Belanja obat dan APD Rp. 3,7 miliar
- Belanja alat kesehatan Rp. 2 miliar
- Belanja pembangunan sarana dan fasilitas Kesehatan Rp. 500 juta

Bantuan Donasi Kemanusiaan/ Charity

(Berdasarkan Institusi)



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jenis Donasi	Jumlah
Dana	Rp 314.428.246.865,00
Masker	8.262.800 unit
Hand Schoen	1.060.300 kotak
Hazmat Suit	108.780 unit
Pelindung Mata	4.480 unit
Test Kit	30.000 kotak



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Bantuan Donasi Kemanusiaan/ Charity (Berdasarkan Institusi)

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Akreditasi A

**DONASI PENGGALANGAN DANA
BANJIR KALIMANTAN SELATAN &
GEMPA BUMI SULAWESI BARAT**



Kalimantan Selatan



Sulawesi Barat

**DONASIKAN BANTUAN
ANDA SEKARANG**

No. Rekening BNI
0381949634 (a.n Tatik Aniah)*

*) INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI 0852 4994 9652 (TATIK); 0813 4913 4333 (WD2)
BUKTI TRANSFER DAPAT DIKIRIM KE NO WA TERSEBUT UNTUK DIKONFIRMASI.

**AYO BANTU RINGANKAN BEBAN
SAUDARA-SAUDARA KITA.**

www.faperta.unmul.ac.id faperta@unmul.ac.id [FAPERTA UNMUL TV](#) [faperta.unmul_](#) [Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman](#)



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pembelajaran dari Bencana



- Pemahaman Bencana Alam dan Bencana Non Alam terbatas – **BNPB-BPBD** –leader pada saat bencana -> Kemenkeu, PUPR, Kemenkes, Kemensos dll
- **Dana siap pakai—dana darurat—dana tidak terduga** – tidak cukup tersedia dan siap digunakan meskipun sudah dianggarkan
- Alokasi dana untuk bencana dan krisis kesehatan masih tergantung keinginan daerah, belum disesuaikan dengan **analisis risiko bencana** dan krisis kesehatan daerah setempat.
- Pengalaman kejadian bencana dan krisis kesehatan belum menjadi dasar pengadaan dan penentuan **alokasi dana untuk bencana dan krisis kesehatan** di daerah.



Terimakasih

www.manajemen-pembiayaankesehatan.net